

Jurnal Hubungan Internasional Indonesia

<http://jhii.fisip.unila.ac.id/ojs/index.php/jhii>

TUJUAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DALAM PERJANJIAN ABRAHAM TAHUN 2020

Grace Inka Putri¹, Hasbi Sidik², Khairunnisa Simbolon³

¹Hubungan Internasional, Universitas Lampung, Indonesia

²Hubungan Internasional, Universitas Lampung, Indonesia

³Hubungan Internasional, Universitas Lampung, Indonesia

graceinkaputri@gmail.com

ABSTRAK

Keterlibatan AS di Timur Tengah dalam mengusahakan perdamaian telah berlangsung lama. Perjanjian Abraham hadir sebagai upaya perdamaian oleh AS di bawah kepemimpinan Donald Trump yang dalam realisasinya tidak melibatkan pihak utama yang berkonflik, yakni Palestina. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi tujuan kebijakan luar negeri AS dalam Perjanjian Abraham tahun 2020. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan luar negeri oleh Jean Frederic Morin dan Jonathan Paquin, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dengan didukung oleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara tujuan yang disampaikan dalam dokumen secara eksplisit dan yang dikejar melalui perilaku AS. Peneliti menemukan tujuan implisit lain dimana didorong oleh kepentingan nasional, yakni mempertahankan pengaruh AS di regional Timur Tengah dengan menguatkan posisi Israel di kawasan, menjadikan negara-negara Arab sebagai garda terdepan pertahanan AS didukung dengan penjualan senjata JSF-35 yang meningkatkan ekonomi AS, membentuk wadah aliansi perlawanan non-formal terhadap Iran yang dianggap sebagai ancaman regional, dan mempertahankan dukungan suara Donald Trump dalam pemilihan umum tahun 2020.

Kata kunci: Perjanjian Abraham, AS, KLN, Israel, Negara Arab

ABSTRACT

US involvement in the Middle East in pursuit of peace has been longstanding. In 2020, the Abraham Accords was presented as a peace effort by the US under the leadership of Donald Trump. However, this agreement has been contradicted by the fact that its realization does not involve the main party to the conflict, the Palestinians. This article aims to identify US foreign policy objectives in the 2020 Abraham Accords. The theory used in this research is the theory of foreign policy by Jean Frederic Morin and Jonathan Paquin. This research uses a qualitative approach and descriptive method supported by secondary data. The results show that there is a difference between the goals conveyed in the document and those pursued through US behavior. The goal of seeking Middle East peace through the Abraham Accords is explicitly stated in the agreement. However, researchers found other implicit goals to be pursued which are driven by national interests, namely maintaining US influence in the Middle East region by strengthening Israel's position in the region, making Arab countries the frontline of US defense supported by the sale of JSF-35 weapons that boost the US economy, forming a forum for a non-formal resistance alliance against Iran which is considered a regional threat, and maintaining Donald Trump's vote support in the 2020 general election through the Abraham Accords.

Keywords: Abraham Accords, US, FP, Israel, Arab Countries

Pendahuluan

Timur Tengah merupakan kawasan yang memiliki luas sekitar 6.255.160 km². Wilayah ini membentang dari Iran di sebelah timur hingga Maroko di sebelah barat, Turki di sebelah utara, dan Yaman di sebelah selatan. Terdapat dua puluh dua negara Arab di kawasan ini yang terdiri dari Bahrain, Komoro, Djibouti, Algeria, Irak, Kuwait, Yordania, Mesir, Moroko, Oman, Libya, Mauritania, Qatar, Saudi Arabia, Palestina, Syria, Sudan, Tunisia, Somalia, Uni Emirat Arab (UEA), Lebanon, dan Yaman (LAS, 2021). Negara-negara Arab tersebut diklasifikasikan berdasarkan kesamaan bahasa, identitas budaya, sejarah, serta geografis. Kawasan ini memegang peran signifikan di dalam dunia internasional oleh karena letaknya yang strategis. Hal ini dikarenakan Timur Tengah menjadi penghubung antara tiga benua yakni Afrika, Asia, dan Eropa. Selain itu, kawasan ini juga kaya akan sumber daya alam, terutama minyak bumi (Fawcett, 2013).

Terlepas dari kekayaan alam yang dimilikinya, Timur Tengah juga menjadi kawasan yang sangat kompleks. Kawasan ini mendapat sebutan pusat utama konflik. Terdapat satu konflik di Timur Tengah yang telah berlangsung lebih dari tujuh puluh tahun dan belum menemukan solusi yang tepat hingga saat ini, yaitu konflik Israel dan Palestina (Sumadinata & all, 2019). Konflik ini menarik perhatian masyarakat internasional sejak lama karena kompleksitasnya yang menyangkut aspek agama, identitas, dan keamanan (Alon & Bar-Tal, 2016). Konflik tersebut dimulai ketika Israel memproklamasikan dirinya sebagai negara pada 14 Mei 1948. Hal tersebut didasarkan pada *Delfour Agreement* yang dikeluarkan Inggris pada 1917 sehingga kaum Yahudi yang sebelumnya bermigrasi ke tempat lain kembali ke tanah Palestina. Gerakan politik tersebut kemudian dikenal dengan *Zionism* dan ujung perjuangannya membangun suatu negara kebangkitan bangsa. Yahudi di tanah perjanjian (*promised land*) dengan kemerdekaan politik, negara, dan penduduk mayoritas (Avi, 2001).

Setelah kemerdekaan Israel, berbagai perang mulai bermunculan antara Israel dengan negara–negara Arab. Perang ini dipicu oleh pembagian wilayah menurut *UN Partition Plan* yang menyebutkan komposisi wilayah 55% bagi Yahudi dan 45% bagi negara Arab, sedangkan penduduk Yahudi hanya sekitar 7% dari total penduduk Palestina (Dror, 2007). Palestina yang didukung oleh negara-negara Arab melakukan penyerangan terhadap Israel, dikenal dengan Perang Al-Nakba. Namun, perang tersebut dimenangkan oleh Israel dan mendapat tambahan kekuasaan atas wilayah dari kemenangan perang tersebut.

Perang selanjutnya terjadi tahun 1967 yakni *Six Days War* oleh negara-negara Arab yang terdiri dari Lebanon, Suriah, Mesir, dan Yordania terhadap Israel yang kembali dimenangkan oleh Israel (Oren, 2003). Bahkan, Israel berhasil mendapatkan

wilayah Gaza, Semenanjung Sinai, Tepi Barat Yordania, sebelah Timur Yerusalem, dan Dataran Tinggi Golan di Suriah. Tahun 1973, negara-negara Arab kembali melakukan perlawanan pada Israel dan berhasil memaksa Israel untuk mengembalikan wilayah Gaza dan Semenanjung Sinai pada Mesir tahun 1979. Seiring dengan berjalannya waktu, Palestina turut mendapatkan hak pendirian sebagai suatu negara pada 15 November 1988. Keikutsertaan Palestina dalam forum internasional kemudian diwakilkan oleh *Palestine Liberation Organization* (PLO) mengingat Palestina belum mendapatkan pengakuan sebagai negara berdaulat. Sejak saat itu, banyak usaha perdamaian yang diupayakan negara lain untuk memulihkan hubungan Israel dan Palestina, terutama AS.

Keterlibatan AS dalam upaya penyelesaian konflik Israel dan Palestina telah berlangsung lama. Hal ini didukung ketika AS dianggap memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah sebagai negara *superpower* pasca keluar sebagai pemenang di Perang Dingin (Fukuyama, 1992). Dengan perannya sebagai negara *superpower*, kebijakan AS baik dalam maupun luar negeri yang didorong oleh kepentingan nasionalnya memberikan dampak masif bagi dunia. AS secara tidak langsung memiliki otoritas untuk mengatur dan memengaruhi percaturan politik global serta memiliki kemampuan memaksa untuk negara yang berkonflik melakukan perundingan damai. Timur Tengah sendiri menjadi kawasan fundamental dalam kebijakan luar negeri AS oleh karena kekayaan sumber daya alamnya. Hal ini dapat diidentifikasi melalui upaya AS berusaha menjaga hubungan diplomatik dengan negara–negara Arab. AS di Timur Tengah juga berfokus pada hal keamanan yang didukung oleh data banyaknya pangkalan militer AS di Kawasan Timur Tengah di dua belas negara yang terdiri dari Bahrain, Djibouti, Mesir, Irak, Israel, Yordania, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, UEA, dan Turki (Wallin, 2018).

Salah satu kebijakan luar negeri AS untuk melanjutkan upaya perjuangan perdamaian di Timur Tengah yaitu Perjanjian Abraham (*Abraham Accords*). Perjanjian ini dikeluarkan oleh AS di tahun 2020 pada masa pemerintahan Donald Trump (The Abraham Accords Declaration, 2020). Di perjanjian ini, AS memegang peranan strategis sebagai mediator perjanjian dengan secara langsung melibatkan negara–negara Arab untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Sejak diberlakukan pada tahun 2020, Perjanjian Abraham melalui normalisasi hubungan diplomatik Israel dengan negara-negara Arab mengalami peningkatan. Hal ini didukung dana kongres AS sebesar US\$250 juta serta pertukaran *people-to-people* untuk mempromosikan normalisasi hubungan tersebut (IMEU, 2022). Lebih rinci, AS juga memperhatikan makna nama perjanjian dimana penggunaan nama Abraham sebagai perjanjian dipilih AS sebagai bentuk penghormatan terhadap tiga agama di Kawasan Timur Tengah yakni Islam, Kristen, dan Yahudi.

Normalisasi yang dalam Bahasa Inggris disebut *normalize*, memiliki makna *a return to normalcy*. Sedangkan, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) normalisasi berarti tindakan menjadikan normal (biasa) kembali atau tindakan mengembalikan pada keadaan, hubungan, dan sebagainya yang normal (KBBI, 2023). Normalisasi kini berkembang menjadi suatu konsep yang tercakup dalam hubungan diplomatik negara dan diartikan sebagai suatu upaya dalam mewujudkan persetujuan bersama dengan tujuan mengakhiri konflik, yang dapat dilakukan melalui perjanjian damai atau membangun kembali hubungan diplomatik. Barston menjelaskan pandangannya terhadap normalisasi sebagai “*Normalisation is seen as a process involving: the recognition of the need for measures to reduce tension or friction, and their introduction; promotion of improved relations; and isolation, containment or resolution—wholly or partly—of major sources of dispute or tension*” (Barston, 2014).

Negara-negara Arab yang diketahui melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel adalah Bahrain, Sudan, Maroko, dan UEA pada tahun 2020, yang mana negara-negara ini merupakan anggota Liga Arab. Keempat negara ini dianggap melanggar nilai Liga Arab serta melakukan pengkhianatan terhadap Palestina oleh negara Arab lainnya terutama Turki (Baron & all, 2022). Hal ini didasarkan pada salah satu syarat bagi negara–negara Arab untuk melakukan normalisasi dengan Israel adalah tercapainya solusi dua negara (*two states solution*), yakni bagi Palestina dan Israel.

Normalisasi hubungan diplomatik pertama dilakukan oleh Israel dan UEA pada 13 Agustus 2020 di Halaman Selatan Gedung Putih, Washington D.C (The Abraham Accords Declaration Israel and UEA, 2020). Normalisasi ini diwakili oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri UEA H.H. Abdullah bin Zayed Al Nahyan, dan Presiden AS Donald Trump sebagai saksi. Normalisasi hubungan diplomatik kedua oleh Israel dan Bahrain dilakukan pada 15 September 2020. Perjanjian ini diwakili oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Raja Hamad bin Isa bin Salam al-Khalifa dan Presiden AS Donald Trump sebagai saksi. Normalisasi hubungan diplomatik ketiga dilakukan oleh Maroko dan Israel pada 10 Desember 2020. Normalisasi Israel dan Maroko di atas kertas diwakili oleh Saad Dine El Otmani dari Maroko, Jared Kushner dari AS, dan Meir Ben-Shabbat serta Alon Ushpiz dari Israel pada 22 Desember 2020 (The Abraham Accords Declaration Israel and Morocco, 2020). Normalisasi hubungan diplomatik keempat dilakukan oleh Israel dengan Sudan pada 6 Januari 2021. Upaya normalisasi ini diusahakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kepada Perdana Menteri Sudan yakni Abdalla Hamdok dan Abdel Fattah al-Burhan dalam suatu pertemuan (The Abraham Accords Declaration Israel and Sudan, 2020).

Meski tidak menjadi upaya perdamaian secara spesifik bagi konflik Israel dan

Palestina, namun Perjanjian Abraham menjadi bagian usaha perdamaian dalam konflik tersebut untuk mencapai Timur Tengah yang damai. Akan tetapi, tindakan AS dalam membantu normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab justru semakin memperkeruh konflik keduanya hingga mendapatkan kritik dari berbagai pihak (Rehman, 2020). AS juga tidak melibatkan pihak utama yang terlibat konflik di Timur Tengah dalam usaha perjanjian damai. Hal ini berlawanan dengan komitmen Donald Trump dalam mengusahakan kesepakatan yang menguntungkan Israel dan Palestina dengan mendukung solusi dua negara (*two states-solution*). Normalisasi hubungan Israel dan negara-negara Arab hanya dapat dipenuhi jika memenuhi tiga syarat, yaitu menyerahkan wilayah Yerusalem Timur, mengakui hak Palestina untuk kembali, dan merujuk kembali ke perbatasan tahun 1967. Perjanjian Abraham secara tidak langsung mengisolasi dan meminggirkan rakyat Palestina secara politis dari keterikatannya dengan negara-negara Arab serta mengorbankan hak-hak Palestina (Rehman, 2020).

Di sisi lain, kecenderungan terhadap Israel dalam Perjanjian Abraham oleh AS diyakini terdapat tujuan lain yang ingin dikejar. Hal ini semakin diperkuat dimana kebijakan luar negeri yang dikeluarkan AS pada pemerintahan Donald Trump harus berupaya mengedepankan kepentingan nasional dengan visi politik dalam masa pemerintahannya (Siswanto, 2018). Fenomena ini kemudian perlu dibahas dimana idealnya upaya perjanjian damai dibentuk dengan memfokuskan pihak-pihak yang berkonflik dan mencari akar konflik agar tidak menimbulkan konflik baru dan sebagai pihak yang dipilih atau bahkan menawarkan sebagai mediator seharusnya bersikap netral (Anderlin, 2014). Sementara, Perjanjian Abraham yang dinyatakan AS sebagai upaya perdamaian bagi Kawasan Timur Tengah melalui usaha normalisasi hubungan Israel dan empat negara-negara Arab justru mengesampingkan isu Israel dan Palestina dengan tidak melibatkan Palestina dan cenderung memihak pada Israel. Perjanjian Abraham sendiri berlawanan dengan komitmen AS mendukung solusi dua negara dan melanggar prinsip negara-negara Arab, terutama menciptakan ketidakadilan bagi Palestina. Oleh karena itu, isu ini perlu untuk dikaji lebih lanjut untuk mengetahui tujuan apa yang sedang sebenarnya sedang dikejar AS dalam Perjanjian Abraham.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis yang bersifat deskriptif. Dasar peneliti dalam menggunakan pendekatan kualitatif yakni pada fenomena yang akan diteliti dimana peneliti berusaha untuk menemukan dan memahami tujuan AS yang juga tersirat dalam Perjanjian Abraham. Adapun dalam penelitian ini, peneliti mengambil sebagian besar data-data dari pemerintahan resmi AS, *U.S Department of State* yang mengeluarkan dokumen resmi *The Abraham*

Accords Declaration, Defense Security Cooperation Agency yang menyediakan data penjualan senjata AS, pidato dan hasil wawancara Donald Trump dengan beberapa media *online* yang kemudian diperoleh peneliti melalui media berita *online* seperti CNBC, The Guardian, CNN, Reuters, USA Today, Al Jazeera, LA Times, Times of Israel, laporan riset terkait Perjanjian Abraham oleh *Pew Research Center* dari berbagai negara dan isu pemilihan umum di AS, publikasi jurnal-jurnal dari *Middle East Eye* (MEE), *German Institute for Global and Area Studies* (GIGA), dan *Council of Foreign Relations* (CFR) mengenai hubungan AS dengan Iran.

Gambaran Umum Perjanjian Abraham (*Abraham Accords*)

Perjanjian Abraham atau yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Abraham Accords* merupakan serangkaian perjanjian, dialog, dan atau kesepakatan damai antara Israel dan beberapa negara–negara Arab. Perjanjian ini dibantu oleh AS sebagai penengah atau mediator di bawah masa pemerintahan Donald Trump melalui dialog antaragama dan antarbudaya. Peran AS sebagai mediator menjadi sangat penting dimana selama berbulan–bulan membantu menengahi para pemimpin negara Timur Tengah melakukan negosiasi hingga akhirnya menandatangani perjanjian Abraham (Schneider, 2022). Selain itu, AS juga berperan dalam melakukan pendalaman dan perluasan kesepakatan tersebut untuk menjangkau lebih banyak normalisasi hubungan.

Perjanjian Abraham merupakan upaya perdamaian lanjutan dari sebelumnya dalam rangkaian *The US Peace Plan* di Timur Tengah oleh Presiden Donald Trump pada Januari 2020 yang dikenal dengan rencana perdamaian *Deal of the Century* (Ahmed, 2021). Proposal dengan visi perdamaian dan keamanan setebal 181 halaman dengan 22 bagian mencakup setiap bagian dari konflik Israel dan Palestina, berisikan *road map* pembagian kekuasaan di daerah konflik Timur Tengah yang juga mencakup aspirasi mengenai solusi dari dua negara, status kedaulatan Yerusalem, perbatasan, pengungsian, pernyebaran perbatasan Jalur Gaza, dan pertukaran komersial (ACRPS, 2020). Meski *Deal of the Century* berusaha meyakinkan bahwa akan memberikan ruang bagi rakyat Palestina untuk mendapatkan kehidupan yang damai, terhormat, dan bermartabat, namun perjanjian ini mendapat banyak penolakan karena dianggap lebih bersifat ekonomi daripada politis bagi Palestina dan cenderung memberikan manfaat besar bagi Israel (Ahmed, 2021).

Lahirnya Perjanjian Abraham merupakan bentuk keberhasilan diplomasi Jared Krushner dan beberapa diplomat lainnya dalam menegosiasikan Perjanjian Abraham kepada negara–negara Arab (Staff, 2020). Krushner sendiri diketahui menjabat sebagai Penasehat Senior Presiden Donald Trump, Direktur Kantor Inisiatif Damai Timur Tengah, dan negosiator utama dalam Perjanjian Abraham yang mengarahkan serta

berhubungan langsung dengan pihak–pihak terlibat serta memastikan bahwa perjanjian ini selaras dengan kepentingan daripada AS. Kushner menyebutkan bahwa Perjanjian Abraham merupakan kombinasi antara orang benar, tempat yang tepat, dan waktu yang tepat untuk bekerja sama (Khalid, 2022).

Nama Abraham (atau dalam Dunia Arab dikenal Ibrahim) merujuk pada sejarah dimana Abraham menjadi Bapa Iman dari tiga agama besar di Timur Tengah yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam serta menunjukkan ketiganya memiliki akar yang sama serta menjadi titik temu ketiga agama tersebut (Karman, 2019). Pemilihan nama perjanjian oleh AS juga menjadi usaha mempromosikan persatuan antara orang Arab dan Yahudi melalui penamaan mentalitas persaudaraan dengan mengakui patriarkh bersama (Joseph, 2022). Penamaan Abraham menjadi simbolis politik untuk meningkatkan sentimen persaudaraan dan menjadi momentum penting dalam sejarah perpolitikan Israel sekaligus sebagai usaha perdamaian Israel dengan dunia Arab.

Melalui Perjanjian Abraham yang mendapat dukungan bipartisan kuat dari AS, dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, empat negara Arab melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Keempat negara tersebut yaitu UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko yang mana mengikuti jejak Mesir dan Yordania yang telah melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel lebih dahulu. Yordania melakukan perjanjian damai dengan Israel pada tanggal 26 Oktober 1994 di Arabah, kemudian dilanjutkan dengan *Washington Declaration* yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin, Raja Hussein Yordania, dan Presiden AS Bill Clinton di *White House* (Arbar, 2022). Sedangkan, Mesir melakukan perjanjian damai dengan Israel pada tanggal 17 September 1979 di *White House* dengan bantuan Presiden AS, Jimmy Carter. Dengan demikian, Perjanjian Abraham menambahkan jumlah negara yang melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel menjadi enam negara.

Presiden Donald Trump bahkan memberikan julukan kepada negara-negara Arab yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, yaitu *Dawn of A New Middle East* yang berarti Fajar Timur Tengah Baru (AAPI, 2023). Perjanjian ini juga digambarkan sebagai suatu upaya perdamaian yang bersifat *win-win solution* bagi pihak yang terlibat sekaligus sebagai pintu pembuka bagi umat muslim di dunia untuk mengunjungi Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, yang diyakini sebagai tempat tersuci ketiga dalam Islam (Staff, 2020). Perjanjian Abraham diklaim telah mengurangi ketegangan konflik bersenjata di Timur Tengah, termasuk dalam menangani konflik antara Israel dan Palestina dengan memastikan adanya pengakuan serta jaminan bahwa rakyat Palestina dan Israel hidup berdampingan dengan adanya keamanan, kebebasan, dan kemakmuran (Schneider, 2022). Dalam arti lain, Perjanjian Abraham memberikan kesempatan bagi rakyat Palestina untuk melakukan perubahan melalui peningkatan

investasi multilateral dalam ekonomi bersama dengan negara–negara Arab lain yang terlibat dalam perjanjian.

Dalam menjalankan perjanjian tersebut, terdapat empat usaha yang akan diberlakukan oleh negara–negara Arab dan Israel, sebagai berikut (Ahmed, 2021):

1. Pembentukan hubungan diplomatik, dimana para pihak terlibat akan membangun hubungan diplomatik bilateral secara penuh;
2. Prinsip umum, dimana para pihak terlibat harus mengikuti piagam ketentuan Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) dan norma hukum internasional dalam mengatur hubungan antarnegara. Dalam hal ini berkaitan dengan bentuk penghormatan dan mengakui kedaulatan negara serta mengembangkan persahabatan demi terciptanya kondisi damai;
3. Pendirian kedutaan besar, dimana dalam rangka menciptakan hubungan diplomatik secara penuh maka harus didukung dengan adanya kedutaan besar dimana para pihak terlibat akan bertukar duta besar sesuai dengan prinsip hukum internasional;
4. Perdamaian dan stabilitas, dimana para pihak yang terlibat mengembangkan sifat pengertian dan koordinasi diantara negara dan mendiskusikan hal–hal yang mengembangkan kerjasama (Balaji, 2023). Dalam hal ini, negara–negara Arab yang terlibat dalam Perjanjian Abraham menyeratakan pandangannya terhadap kehadiran perjanjian ini. Negara Arab juga meyakini bahwa melalui Perjanjian Abraham, konflik antara Israel dan Palestina dapat terselesaikan.

Perjanjian yang bersifat berkelanjutan ini tidak lepas dari kepemimpinan dan diplomasi AS sebagai mediator yang bersifat ‘agresif’ dalam Perjanjian Abraham. AS menjadi mediator dan fasilitator yang bersifat proaktif dalam pelaksanaan penandatanganan perjanjian di *White House* dan dianggap sebagai mitra strategis bagi negara–negara Arab (Voice, 2022). Perjanjian Abraham dalam jangka panjang tetap membutuhkan kepemimpinan dan dukungan AS guna memperkuat eksistensi, memperluasnya ke negara lain, dan memastikan upaya mencapai potensi penuh perjanjian, Di sisi lain, Perjanjian Abraham tahun 2020 dinilai sebagai bentuk upaya revolusi hubungan internasional oleh Presiden Donald Trump yang paling bergejolak bagi dunia (Phillipps, 2022). Oleh sebab itu banyak kritik yang dilayangkan terkait dengan konflik yang masih terjadi antara Israel dan Palestina yang dianggap melemahkan solusi dua negara. Namun lebih dari itu, Perjanjian Abraham dianggap tidak menyelesaikan konflik apapun di Timur Tengah. Kritik tersebut disampaikan oleh karena pihak–pihak yang terlibat dalam Perjanjian Abraham tidak pernah berperang dengan Israel sejak awal.

Identifikasi Perjanjian Abraham sebagai Kebijakan Luar Negeri AS

Perjanjian Abraham merupakan salah satu dari beberapa kebijakan luar negeri yang dijalankan AS terhadap Kawasan Timur Tengah. Sejak dideklarasikan, baik melalui pidato dan dokumen perjanjian resmi, Perjanjian Abraham memiliki tujuan yang jelas dimana disampaikan secara eksplisit kepada masyarakat internasional. Melalui analisis empat dokumen (Israel dan UEA, Israel dan Bahrain, Israel dan Maroko, serta Israel dan Sudan) dari rangkaian dokumen Perjanjian Abraham, peneliti mengidentifikasi beberapa kata kunci yang menjadi simbol-simbol dalam perjanjian yaitu *Peace and Security*, *Diplomacy*, *Normalization*, *Economy Development*, *Cooperation*, *Coexistence*, yang dapat diartikan sebagai tujuan dan hasil yang diharapkan daripada hadirnya Perjanjian Abraham.

Tujuan Eksplisit dan Hasil yang Diharapkan dalam Perjanjian Abraham

A. Perdamaian dan Keamanan (*Peace and Security*)

Perjanjian Abraham mengakui pentingnya perdamaian antarnegara yang menjadi jalan pembuka terhadap transformasi perdamaian di Timur Tengah (The Abraham Accords, 2020). Guna mencapai perdamaian itulah Perjanjian Abraham hadir dengan tujuan menjadi pilar dalam usaha perdamaian dan stabilitas. Perjanjian ini menjadi alat dalam memajukan keamanan kawasan Timur Tengah dengan memberikan keuntungan bagi setiap negara yang terlibat didalamnya.

B. Hidup Berdampingan (*Coexistence*)

Hidup berdampingan yang menjadi tujuan dalam Perjanjian Abraham dimaknai menjadi tiga cara, yaitu pertama *social coexistence* yang dilihat melalui sikap toleransi, pengertian, dan rasa hormat terhadap sesama negara yang kemudian diperluas menjadi hubungan *people-to-people*. Kedua, yaitu *religion and cultural coexistence* yang menunjukkan kebebasan beragama dan sikap saling menghargai antaragama serta menggunakan agama sebagai upaya untuk mempromosikan budaya perdamaian. Ketiga, yaitu *interfaith and intercultural dialogues*, dimana melalui Perjanjian Abraham mampu mencapai tujuan dialog antaragama dan antarbudaya yang direalisasikan melalui program pertukaran akademi, budaya, karya ilmiah, dan forum tingkat tinggi lainnya untuk mencapai perdamaian (The Abraham Accords, 2020).

C. Diplomasi (*Diplomacy*)

Diplomasi dalam Perjanjian Abraham dipahami sebagai suatu landasan yang mendorong terjadinya normalisasi Israel dengan negara-negara Arab

(The Abraham Accords, 2020). Dengan adanya terobosan diplomatik, maka promosi stabilitas dan perdamaian yang didasarkan dengan komitmen bersama untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dapat terlaksana. Diplomasi juga dianggap sebagai suatu alat untuk mencapai kepentingan strategis bagi pihak terlibat. Tujuan diplomasi ini kemudian direalisasikan melalui pendirian kantor kedutaan untuk melakukan diskusi serta pengaturan kerja sama dan koordinasi. Diplomasi dalam arti lain juga dapat diinterpretasikan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik secara damai dengan jalur negosiasi.

D. Normalisasi (*Normalization*)

Normalisasi menjadi *output* setelah terlaksananya diplomasi antarpihak terlibat. Keberhasilan diplomasi dipahami mampu memperluas persahabatan dan lingkaran perdamaian (*circle of peace*). Dalam hal ini, normalisasi menjadi tujuan dalam Perjanjian Abraham sebagai kunci pembangunan hubungan diplomatik, perkembangan ekonomi melalui arus regional barang, jasa, pengaturan keamanan, dan lainnya. Normalisasi juga dianggap sebagai *framework* untuk melakukan negosiasi solusi yang resmi atas konflik Israel dan Palestina hingga dapat terselesaikan (The Abraham Accords, 2020).

E. Kerja Sama (*Cooperation*)

Kerja sama dan koordinasi antarpihak sebagian besar dilaksanakan melalui kerja sama sosial dan ekonomi dengan mencakup kolaborasi infrastruktur regional strategis. Dalam hal ini, diwujudkan melalui kerja sama wilayah udara terbuka sehingga adanya penerbangan langsung dan kerja sama ekonomi yang bersifat inovatif. Selain itu, kerja sama dalam Perjanjian Abraham memiliki konteks dalam kerangka kerja sama multilateral Timur Tengah yang turut melibatkan AS dan negara lain (The Abraham Accords, 2020).

F. Pembangunan Ekonomi (*Economy Development*)

Pembangunan ekonomi yang diharapkan dalam Perjanjian Abraham mengacu pada ekonomi bersama. Bidang-bidang yang ditekuni dalam pembangunan ekonomi yaitu investasi, penerbangan, pariwisata, teknologi, dan komunikasi (The Abraham Accords, 2020). Pembangunan ekonomi dianggap sebagai kemakmuran umum yang artinya bahwa setiap pihak yang terlibat diharapkan mendapat keuntungan yang sama. Dengan kemajuan dan pembangunan ekonomi, Perjanjian Abraham juga diyakini dapat semakin berkembang.

Arab Saudi sebagai Target Perjanjian Abraham

Perjanjian Abraham dianggap sebagai terobosan dalam diplomasi regional dengan tujuan untuk menjadi mengubah keadaan Timur Tengah yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan sambutan terhadap perjanjian oleh empat negara Arab dengan jangka waktu singkat (MEE, 2020). Meski demikian, sejatinya Perjanjian Abraham memiliki target untuk semakin memperluas perkembangannya. Perluasan perjanjian ini diharapkan tidak terhenti pada pemerintah tetapi juga masyarakat Arab sebagai bagian penting.

Arab Saudi menjadi satu negara Arab yang sangat diharapkan untuk bergabung ke dalam Perjanjian Abraham. Hal tersebut diyakini mampu menawarkan peluang terbesar guna mengkonsolidasikan, melegitimasi, dan memperluas kesepakatan Abraham. Keinginan tersebut dideklarasikan secara publik oleh AS dan Israel. Arab Saudi bahkan disebutkan sebagai *'the grand prize of normalization'* (Broder, 2020) apabila bergabung dalam perjanjian. Melalui sumber lain, disebutkan pula bahwa Arab Saudi menjadi paus putih (*white whale*) dari perjanjian (Turak, 2020). Frasa paus putih sendiri merujuk pada pendefinisian sesuatu yang sangat diinginkan atau didambakan tetapi sulit untuk dicapai. Arab Saudi dalam Perjanjian Abraham dinilai sebagai kemenangan terakhir yang sangat diharapkan baik oleh AS maupun Israel. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa Israel secara aktif melakukan lobi kepada Arab Saudi untuk bergabung ke dalam Perjanjian Abraham, bahkan menyebutnya dengan *'quantum leap'* (Lynn, 2023).

AS yang memiliki hubungan dekat dengan Arab Saudi turut memberikan bantuan bagi Israel dengan beberapa langkah untuk ekspansi Perjanjian Abraham. Donald Trump diketahui melakukan pertemuan dengan Raja Salman dan berpendapat bahwa Arab Saudi serta beberapa negara Arab lainnya akan bergabung dalam perjanjian tersebut di waktu yang tepat. Hal itu ia sampaikan kepada wartawan saat di Gedung Putih dengan mengatakan bahwa *'I spoke with the King of Saudi Arabia, and we had a great conversation. And I think positive things will happen there, too.'* (MEE, 2020). Tak hanya Donald Trump, Jared Kushner, sebagai arsitektur dalam Perjanjian Abraham, juga menyampaikan *'It would be very good for Saudi business, it would very good for Saudi's defense, and, quite frankly, I think it would also help the Palestinian people'* (MEE, 2020), yang berarti bahwa perjanjian ini akan memberikan keuntungan terhadap kepentingan Arab Saudi.

Terdapat beberapa alasan yang peneliti temukan untuk mengetahui mengapa baik Israel maupun AS gencar melakukan diplomasi dengan Arab Saudi untuk bergabung dalam perjanjian. Pertama, Arab Saudi menjadi negara yang kaya akan energi terutama minyak bumi dan menjadi tempat kelahiran nabi dalam agama Islam.

Kedua, Arab Saudi menjadi negara yang memiliki dua kota yang dianggap paling suci dalam agama Islam, yaitu Mekkah dan Madinah serta menduduki posisi global ideologi Wahabi ultra konservatif (Hincks, 2020). Masjid Al Aqsa juga turut terikat dengan Arab Saudi sebagai situs tersuci ketiga dalam Islam Sunni meskipun masjid tersebut dijaga oleh Yordania. Dalam kata lain, Arab Saudi menjadi kekuatan dan pemain kunci dalam sektor agama di dunia Arab didukung dengan mayoritas umat Muslim yang berpengaruh (Belmonte, 2022). Ketiga, Arab Saudi memainkan peran kunci perpolitikan regional melalui kepemimpinannya dalam berbagai organisasi, salah satunya *the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf*. Letak strategis dari Arab Saudi juga turut menjadi faktor yang menawarkan beragam keuntungan dimana negara ini menghubungkan tiga benua (Butt, 2022). Apabila Arab Saudi tergabung dalam Perjanjian Abraham, maka akan menjadi lompatan kualitatif untuk stabilitas regional dan kepentingan AS.

Perubahan Paradigma Israel sebagai Ancaman

Perjanjian Abraham memberikan dampak perubahan pandangan terhadap Israel oleh negara–negara Arab. Bahkan, penjelasan sebelumnya telah dijelaskan oleh peneliti bahwa Perjanjian Abraham dianggap sebagai terobosan yang diyakini membawa perdamaian di Timur Tengah. Selama bertahun–tahun, Israel dipahami sebagai gangguan utama di regional yang mencegah terciptanya perdamaian serta kemakmuran di Timur Tengah. Namun pasca hadirnya Perjanjian Abraham, Israel dipandang lebih ‘menarik’ dengan segala peluang yang dimiliki sehingga terlaksananya penandatanganan perjanjian tersebut. Perjanjian Abraham di Timur Tengah memengaruhi perubahan dinamika dan berusaha mengarahkan kepada pandangan bahwa Israel tidak lagi menjadi *public enemy* dan penghalang dalam usaha perdamaannya dengan Palestina.

Melalui situs resmi kedutaan besarnya, UEA menyatakan bahwa Perjanjian Abraham membawa *warm peace* dalam Timur Tengah yang diyakini mampu melakukan perubahan positif di kawasan (Embassy, 2023). Dalam hal ini, UEA meyakini bahwa Israel kini tidak lagi menjadi ancaman bagi negaranya. Beberapa mitra Perjanjian Abraham lainnya juga secara terang–terangan menyatakan *'it is time to harvest the fruits of peace first – and that in itself will show Palestinians and others what they can gain if they move forward and jump on the peace train. regional peace'* (Huberman, 2022). Hal demikian turut didukung oleh negara-negara Arab yang merasa lelah dengan konflik berlarut tanpa penyelesaian dan di sisi lain mereka memiliki kepentingan nasional yang ingin dikejar. Perjanjian Abraham dalam hal ini menjadi wadah bagi Israel, AS, dan negara–negara Arab untuk mengusahakan kepentingan dan melakukan kerja sama berbagai sektor.

Melihat dari sisi Israel, melalui perjanjian ini Israel semakin diterima dengan baik dan tidak hanya berkaitan dengan masalah keamanan (GIGA, 2022). Penerimaan oleh negara–negara Arab inilah yang telah diperjuangkan Israel bertahun–tahun hingga dapat terkoneksi ke dalam wilayah. Israel yang sebelumnya terisolasi di kawasan Timur Tengah kini mampu menciptakan peluang baru dalam bentuk kerja sama yang kemudian diperluas ke dalam berbagai sektor seperti perdagangan, teknologi, pariwisata. Hal ini disebabkan oleh kelebihan yang dimiliki Israel jika dibandingkan dengan negara–negara Arab. Dalam hal intelijen, Israel unggul oleh karena perangkat teknologi pengintai *spyware* yang tidak dapat terdeteksi, dikenal dengan Pegasus (Jazeera, 2022). *Spyware* ini digunakan untuk melacak politisi, kepala pemerintahan, aktivis, pemberontak, jurnalis, dan sebagainya. Beberapa negara juga dilaporkan telah menjadi klien yang menggunakan Pegasus, tiga diantaranya merupakan negara yang tergabung dalam Perjanjian Abraham yaitu Bahrain, Maroko, dan UEA (Jazeera, 2022).

Perubahan pandangan terhadap Israel juga didasarkan oleh adanya keberadaan Iran yang kini dianggap sebagai ancaman. Negara–negara Arab dan Israel yang diintegrasikan melalui Perjanjian Abraham memiliki persamaan persepsi terhadap ancaman di Timur Tengah yang ditimbulkan oleh Iran (GIGA, 2022). Perjanjian Abraham dalam hal ini menjadi penata kembali strategis di Timur Tengah untuk menahan ambisi Iran. Latihan militer gabungan antara negara–negara Arab dan Israel menandakan perubahan sejarah mengenai aliansi militer di Timur Tengah, yang tentunya dibantu oleh AS (GIGA, 2022). Selain itu, untuk kepentingan itulah UEA dan Israel melakukan pertukaran informasi intelijen dengan Israel selama bertahun–tahun, yakni berkaitan dengan Iran dan teroris. Peneliti melihat bahwa upaya dalam merubah pandangan Israel tersampaikan secara tersirat seiring melalui kerja sama yang dilakukan dalam lingkup Perjanjian Abraham. Perubahan pandangan tersebut juga didukung oleh AS yang selalu melibatkan Israel dalam setiap tindakannya di Timur Tengah. Berkenaan dengan persepsi terhadap Israel, Jared Kushner menegaskan bahwa ‘*no such thing as permanent enemies*’ (Fountain, 2023), yang berarti tidak ada namanya musuh permanen, merujuk pada Israel yang kini dianggap sebagai rekan kerja sama.

Eksistensi Perjanjian Abraham untuk Jangka Panjang

Sejak kehadirannya pada tahun 2020, Perjanjian Abraham telah mengusahakan keberhasilan dengan merangkul empat negara–negara Arab dalam jangka waktu yang singkat yakni tepatnya dalam enam bulan (Agustus 2020–Januari 2021). Perjanjian Abraham yang bertujuan untuk melakukan normalisasi hubungan antara Israel dengan negara–negara Arab tidak menyebutkan skala waktu atau durasi tertentu secara

eksplisit untuk eksistensinya. Namun, peneliti melihat bahwa kerangka kerja sama yang ditawarkan oleh perjanjian ini bersifat berkelanjutan. Skala waktu pelaksanaan kesepakatan ini akan bergantung pada komitmen serta kerja sama yang berkelanjutan diantara negara–negara yang terlibat. Sepanjang kepentingan Israel, AS, dan negara–negara Arab terpenuhi, maka perjanjian ini tetap diakui dan dilanjutkan. Hingga waktu penelitian ini berjalan, Perjanjian Abraham sebagai kebijakan luar negeri AS yang sebelumnya berada di pemerintahan Donald Trump (2017– 2021 awal) hingga sekarang berada di bawah kepemimpinan Joe Biden (2021 awal – saat ini) masih tetap dilaksanakan untuk mengusahakan agar lebih banyak negara–negara Arab yang terlibat dalam Perjanjian Abraham dengan kerangka kerja yang semakin diperluas.

***America First* Sebagai Doktrin AS Dalam Pemerintahan Donald Trump**

Ketika seorang presiden baru menjabat, pernyataan pidato menjadi sangat penting untuk memahami agenda masa depan dari negara yang sedang ia pimpin. Selain itu, setiap presiden memiliki ciri khas atau doktrin pemerintahan tersendiri yang membedakan dengan masa pemerintahan sebelumnya. Sejak terpilih sebagai Presiden AS ke–45, Donald Trump memetakan dan menegosiasikan kembali kebijakan AS. Ia kemudian memiliki doktrin yang dikenal dengan *America First*, yang dalam Bahasa Indonesia berarti ‘Mengutamakan Amerika’. Doktrin ini kemudian menjadi pedoman dalam menjalankan kebijakan luar negeri AS di bawah pemerintahan Donald Trump dengan perubahan masif terhadap kebijakan domestik maupun internasional. Realisasi doktrin ini merupakan wujud janji kampanye Donald Trump pada tahun 2016 yang sekaligus menjadi kritik kebijakan luar negeri di masa pemerintahan Barack Obama yang disebutnya sebagai ‘*disastrous*’ (Jackson, 2016).

Doktrin dalam pemerintahan Donald Trump dinyatakan secara eksplisit dalam pidato inagurasi yang disampaikan di depan masyarakat AS. Dalam pidatonya Presiden Donald Trump mengatakan ‘*We assembled here today our issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power, from this day forward: a new vision will govern our land, from this day forward, it’s going to be only America first. America first*’ (Politico, 2017). Melalui pernyataan tersebut, Trump meyakini bahwa AS merupakan negara yang dianggap lebih baik dari negara lain dan oleh karena status istimewa maka AS dalam bertindak guna mencapai kepentingan dan keamanan nasional sendiri.

Doktrin ini menjadi dasar dan yang terutama dalam pemerintahan melalui pemberlakuan dua arah yakni bagi arah internal domestik AS dan eksternal yakni hubungan AS dengan negara–negara lain (Politico, 2017). Dalam lingkupan internal, doktrin ini akan membantu industry AS melalui pengurangan dominasi industri asing,

memperbaiki infrastruktur yang rusak, menjanjikan pertumbuhan lapangan kerja, dan memberikan keuntungan lebih terhadap pekerja AS sehingga tercipta kesejahteraan rakyat melalui keputusan perdagangan, pajak, dan imigrasi. Sedangkan dalam lingkupan eksternal, AS akan mencari negara–negara yang memiliki itikad baik dalam persahabatan dengan pemahaman bahwa setiap negara mengutamakan kepentingannya sendiri (Politico, 2017). Dengan demikian, AS juga akan memperkuat aliansi lama dan atau membentuk aliansi baru jika diperlukan untuk menghadapi ancaman bersama. Revitalisasi hubungan dengan negara–negara yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama turut menjadi fokus AS dalam kebijakan luar negerinya.

Dalam mengusahakan pemerintahan, doktrin *America First* sendiri mengalami pro dan kontra bagi beberapa pihak. Melalui pidato inagurasi pada 25 Januari 2017, Donald Trump mengukuhkan doktrin tersebut sebagai doktrin kebijakan luar negeri resmi dalam pemerintahannya. Jajak pendapat masyarakat AS yang dilakukan oleh POLITICO: *Morning Consult Survey* menunjukkan persentase 61% masyarakat AS setuju dan bereaksi positif serta optimis terhadap pesan yang terkandung dalam doktrin *America First*, sedangkan, 39% masyarakat AS merespon pidato tersebut dengan negatif (Sherman, 2017). Namun, beberapa cendekiawan mengkritik doktrin Trump yang dianggap memiliki dampak negatif bagi keberadaan AS dalam dunia internasional dengan mengisolasi AS, bahkan dianggap sebagai kebijakan ‘*America Alone*’. Hal ini didasarkan pada penarikan AS dari sejumlah organisasi internasional seperti *Trans-Pacific Partnership* (TPP), *the Paris Climate Accords*, *the Intermediate Range Nuclear Forces Treaty* (INF), *the Iran Nuclear Deal* dan lainnya oleh Donald Trump (Riechmann, 2019).

Donald Trump kemudian menanggapi kontra dalam kebijakan *America First* di masa pemerintahannya dalam wawancara bersama *Los Angeles Times*. Ia mengatakan bahwa kebijakan ini bukan berarti isolasionalis, melainkan jalur yang berbeda untuk menjaga kepentingan nasional AS serta sebagai upaya mencegah negara lain mengambil keuntungan dari AS (McManus, 2016). Donald Trump menganggap bahwa perjanjian internasional yang melibatkan AS di bawah pemerintahan Barack Obama tidak terlalu penting serta menghambat AS untuk mencapai kejayaan (Myrvold, 2022). Donald Trump membuktikan bahwa kebijakannya bukan isolasionalis melalui langkah pertamanya dalam kebijakan luar negeri dengan pengeboman pangkalan udara Suriah yang diduga melakukan serangan senjata kimia alih–alih menarik AS dari krisis internasional (Jeffrey, 2020).

Di sisi lain, *America First* berarti bahwa AS akan mengusahakan keamanan warga negara dan nasional serta nilai–nilai diatas kepentingan negara lain, seperti hal yang seharusnya perlu dilakukan oleh semua negara. Trump menegaskan bahwa *America First* tidak berarti *America Alone* dan keterlibatan AS dalam dunia

internasional bergantung pada situasi. Dalam hal ini, Trump akan memutuskan hubungan baik dengan negara maupun organisasi internasional yang dianggap melemahkan AS. Hal tersebut dengan jelas ia sampaikan dalam pidatonya yang berbunyi *'I am skeptical of international unions that tie us up and bring America down, and will never enter America into any agreement that reduces our ability to control our own affairs'* (Politico, 2017).

Melalui doktrin ini, sikap dan fokus kebijakan luar negeri AS terhadap suatu wilayah dan negara menjadi berbeda. Kebijakan luar negeri AS bersifat sangat transaksional dan berdasar pada *zero sum game*. Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump dikenal dengan ketidakpastiannya dan seringkali berlawanan dengan komitmen internasional. Timur Tengah menjadi salah satu kawasan yang tidak lepas dari perhatian kebijakan luar negeri AS. Dalam masa kepemimpinan Donald Trump, kebijakan luar negeri AS terhadap Kawasan Timur Tengah terlihat melalui tindakan pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem pada tahun 2017, penarikan AS dari kesepakatan bersama dengan Iran dalam *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA), *Trump Peace Plan* mengenai konflik Israel dan Palestina pada 2020, dan yang terbaru yaitu *Abraham Accords* yang berisikan normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab pada 2020 (Jeffrey, 2020).

Abraham Accords atau Perjanjian Abraham, sebagai fokus dari penelitian ini, merupakan salah satu kebijakan AS yang dikeluarkan oleh Donald Trump terhadap Timur Tengah di penghujung masa jabatannya. Strategi kebijakan luar negeri ini dinilai berani dari Donald Trump dan dikembangkan oleh Jared Krusner dengan membawa Israel dan beberapa negara-negara Arab ke dalam meja perundingan demi mengejar kemakmuran di wilayah MENA dan mengesampingkan konflik yang sedang berlangsung (Phillipps, 2022). Berkaitan dengan doktrin *America First*, Perjanjian Abraham memberikan keuntungan tersendiri bagi AS yakni dalam upaya melindungi kepentingan nasionalnya. Sebaliknya, jika tidak mendapatkan keuntungan maka AS akan memutuskan hubungannya dengan negara-negara terlibat seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut, AS tetap mengamankan persetujuan normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dengan negara-negara Arab dengan tetap mempertahankan posisi AS sebagai mediator dalam Perjanjian Abraham menjadi realisasi dari upaya AS untuk menjadi pembawa damai dalam dunia internasional.

Kebijakan dengan pilar *America First* mengarahkan AS untuk memilah keaktifan dan keikutsertaan AS dalam urusan global. Dalam hal ini, Donald Trump memberlakukan kembali AS pada tahun 1940-an, dimana AS akan berfokus pada kekuatan komersial dengan sedikit minat dalam politik kekuatan global, kecuali apabila memiliki kepentingan melindungi diri dan pengaruhnya (Myrvold, 2022). Keterlibatan

AS dalam Perjanjian Abraham menunjukkan bahwa AS melihat terdapat urgensi dan keuntungan yang didapat dalamnya di Kawasan Timur Tengah. AS juga secara aktif mempromosikan Perjanjian Abraham sehingga lebih banyak lagi negara–negara Arab yang menormalisasikan hubungan diplomatik dengan Israel.

Kepentingan Nasional AS dalam Perjanjian Abraham Pembentukan Aliansi dalam Menghadapi Ancaman Nuklir Iran dan Terorisme

Hubungan antara Iran dan AS mengalami dinamika yang sangat dinamis bergantung pada kepala pemimpin dari masing–masing negara. AS yang saat itu masih dipimpin oleh Presiden Barack Obama mengadopsi perjanjian JCPOA yang diresmikan pada 18 Oktober 2015. JCPOA sendiri merupakan kesepakatan nuklir antara Iran, Jerman, dan negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (China, Rusia, Inggris, Prancis, dan AS), dikenal dengan sebutan P5+1, pada Juli 2015 dan berlaku secara efektif pada Januari 2016 (Robinson, 2022). Iran dalam perjanjian ini sepakat untuk membongkar serta mendesain kembali reaktor nuklir di Arak, membatasi pengayaan uranium dengan jangka waktu setidaknya lima belas tahun, dan bersedia membuka fasilitas nuklir untuk dilakukan inspeksi internasional yang lebih efektif, yaitu *International Atomic Energy Agency* (IAEA), dengan imbalan keringan sanksi dan uang dengan total \$150 miliar dolar (Robinson, 2022).

Perjanjian ini berangkat dari kekhawatiran negara-negara besar terhadap Iran yang mampu menimbulkan krisis baru di Timur Tengah apabila memiliki senjata nuklir. Mereka meyakini bahwa kesepakatan ini mampu mencegah kebangkiran program nuklir Iran, atau untuk meningkatkan *breakout time* Iran (CFR, 2022). Dengan adanya perjanjian tersebut, AS lambat laun mencabut beberapa sanksi nuklir terhadap Iran. Namun, hal ini dianggap sebaliknya oleh Partai Republik dan Demokrat dengan dasar bahwa pencabutan sanksi justru akan semakin menguatkan Iran di kawasan serta meningkatnya intensitas kekacauan oleh Iran (CFR, 2022).

Hingga tiba peralihan kepemimpinan AS dari Presiden Barack Obama ke Presiden Donald Trump, AS secara drastis merubah haluan kebijakan luar negerinya. Donald Trump memulai masa kepemimpinannya pada tahun 2017 dan setahun kemudian ia menarik AS dari perjanjian tersebut, tepatnya pada 8 Mei 2018. Sebelumnya ia menawarkan dua kemungkinan, yaitu memperbaiki kelemahan JCPOA atau AS akan menarik diri, namun gagalnya kesepakatan pertama menyebabkan keluarnya AS dari perjanjian (U.S. Embassy, 2018). Donald Trump juga mengatakan bahwa alih–alih mengucapkan ‘*thank you*’ kepada AS atas keringanan sanksi, Iran justru mengutuki ‘*death to America*’ (U.S. Embassy, 2018).

Pasca keluar dari perjanjian, AS di bawah kepemimpinan Donald Trump masih

memiliki pandangan bahwa Iran merupakan negara dengan rezim menyimpang yang tindakannya hanya menyebabkan kekacauan, tidak hanya di Timur Tengah tetapi dunia. Oleh karenanya, Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir sama sekali. Dengan demikian, AS semakin menekan sanksi untuk memberikan *maximum pressure* pada Iran (CFR, 2022). Sanksi baru AS terhadap Iran menargetkan dua sektor strategis, yakni minyak dan finansial. Sanksi pertama dilakukan pada 7 Agustus 2018 dimana AS melarang perusahaan-perusahaan AS untuk bekerja sama dengan pembisnis Iran dalam berbagai bidang, misalnya karpet, emas, dan lainnya. Sanksi kedua diberlakukan pada November 2018 dengan pembatasan kerja sama dalam bidang perminyakan serta perbankan yang memengaruhi sektor ekonomi Iran (Taufiq & Alkholid, 2021). Pemberlakuan sanksi maksimal oleh AS kemudian dipuji oleh parlemen dari Partai Republik, Israel, dan Arab Saudi.

Fokus AS terhadap Iran tidak berhenti pada isu nuklir, tetapi juga terorisme. AS percaya bahwa agresi Iran masih berlanjut yang dilakukan dengan mensponsori berbagai kelompok teroris, seperti Taliban, Hamas, Al-Qaeda, dan Hizabullah. Sponsor tersebut dilakukan Iran melalui pemberian pelatihan, mempersenjatai, dan mendanai lebih dari 100.000 militan untuk menyebarkan teror di Timur Tengah, terutama Yaman, Suriah, Afghanistan, dan Lebanon (NSD, 2020). Hingga pada 15 April 2019, Donald Trump menyatakan *the Islamic Revolutionary Guard Corps* (IRGC), salah satu cabang dari tentara Iran, sebagai *Foreign Terrorist Organization* (FTO) (CFR, 2022). Ia juga menyatakan bahwa kepala IRGC melakukan penangkapan dan penyiksaan massal untuk membungkam rakyat Iran (U.S. Embassy, 2018). Hal tersebut merupakan kali pertama bagi AS menunjuk bagian dari suatu pemerintahan resmi di negara lain sebagai kelompok teroris.

Selain itu, AS juga mengetahui bahwa Iran melakukan serangan siber terhadap sistem infrastruktur AS, memenjarakan rakyat AS dengan tuduhan palsu, dan melakukan serangan pada kapal tanker minyak milik Arab Saudi, UEA, dan Norwegia yang mengancam kebebasan dalam navigasi di Laut Merah dan Teluk Arab pada 13 Juni 2019 (CFR, 2022). Oleh karena kejadian tersebut, Donald Trump memberikan julukan kepada Iran '*A nation of terror*' dan mengerahkan pasukan tentara AS ke Timur Tengah sebagai reaksi dari peristiwa tersebut (CFR, 2022). Dua hari pasca pengerahan pasukan AS tersebut IRGF merespon dengan menembak jatuh drone pengintai milik AS.

Tensi hubungan keduanya kembali memanas pada tahun 2020 dimana AS membunuh Jenderal Utama Qassem Soleimani, kepala pasukan elit Iran, dengan menggunakan pesawat tanpa awak yang menembakkan rudal. Qassem Soleimani diketahui menjadi orang tertinggi kedua setelah Ayatollah Khamenei sehingga peristiwa tersebut memicu ketegangan konflik keduanya. Selanjutnya, Iran melakukan

balasan dengan meluncurkan rudal ke pangkalan AS di Irak. Namun ketika dalam kondisi siaga, Iran secara tidak sengaja, dengan dalih *human error*, menembak pesawat komersial milik Ukraina yang sedang melintas di wilayah udara Iran dan memakan korban sebanyak 176 jiwa (Jazeera, 2021).

Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti menemukan bahwa kepentingan AS yaitu menahan perkembangan nuklir Iran melalui Perjanjian Abraham. Peneliti melihat kepentingan ini tercapai oleh karena adanya kesamaan pandangan AS, Israel, dan negara–negara Arab dalam memandang Iran sebagai ancaman . Di sisi negara Arab, strategi keamanan AS melalui Perjanjian Abraham dianggap sejalan dengan kepentingan negara mereka. Secara tidak langsung, negara–negara Arab ini juga memengaruhi kedudukan regional Iran dengan memilih untuk lebih dekat kepada Israel dan AS dan mengisolasi Iran. Dalam hal ini, Perjanjian Abraham menjadi suatu aliansi vital anti-Iran dengan berfokus pada suatu negara, dalam hal ini Iran, yang memiliki implikasi terhadap dinamika regional dan memengaruhi keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. AS menggunakan perjanjian ini sebagai salah satu strategi untuk melawan pengaruh Iran dan aktivitas destabilisasinya dengan harapan Iran mau untuk mengubah perilakunya dalam hal nuklir.

Tindakan AS berkaitan dengan strategi *offshore balancing* dimana negara dengan kekuatan besar menggunakan kekuatan regional yang dianggap sebagai sekutu untuk menahan munculnya kekuatan musuh potensial dan memungkinkan untuk terlibat langsung apabila diperlukan. Strategi tersebut berprinsip pada pengawasan terhadap musuh agar tidak menguasai dominasi wilayah strategis (Brands, 2015). AS melalui Perjanjian Abraham melakukan strategi pemeliharaan sistem dengan sekutu yaitu empat negara Arab dan Israel untuk menahan Iran di kawasan. Israel sendiri menjadi sekutu utama AS di Timur Tengah yang semakin diperkuat untuk menahan Iran dan tantangan lainnya.

Melalui strategi ini, AS akan tetap mempertahankan kehadiran militer di Timur Tengah namun menahan diri untuk tidak menambah pasukan militer atau jika dimungkinkan secara perlahan menarik pasukannya di luar negeri untuk kembali. Di sisi lain, AS akan lebih berfokus pada pemberian dukungan dalam intelijen dan teknologi bagi mitra regionalnya daripada melakukan tindakan praktis intervensi secara langsung (Mearsheimer & Walt, 2016). Dengan demikian, AS masih mampu untuk memengaruhi dan membentuk koalisi regional di Timur Tengah dengan meminimalkan risiko dan biaya. AS juga dapat berbagi beban keamanan regional dengan sekutunya alih–alih menahan beban sendiri. Dengan berkurangnya kehadiran AS secara militer di Timur Tengah namun masih menjadi sekutu utama telah menunjukkan bahwa negara–negara Arab masih mengakui dan bergantung pada dukungan AS.

Peneliti juga melihat bahwa AS sedang membantu serta mengusahakan agar negara–negara Arab secara perlahan mampu menghadapi Iran. AS tetap mendorong dan menjaga negara–negara Arab serta akan mengintervensi apabila diperlukan dalam kondisi darurat. AS dalam hal ini akan lebih mengutamakan kekuatan regional sebagai garis pertahanan utama dan tidak mengusahakan aksi militer. AS menyadari bahwa aksi militer tidak akan mampu mencegah tekad suatu negara, yakni Iran, untuk mengusahakan nuklirnya (Mearsheimer & Walt, 2016). Perjanjian Abraham tidak hanya menjadi strategi AS dalam menahan perluasan nuklir Iran tetapi juga terorisme dan kelompok ekstrimis. Pada tahun 2020, Iran kembali menyatakan dukungannya pada kelompok teroris Syiah di Irak, termasuk Kata’ib Hizballah, Harakat al-Nujaba, dan Asa’ib Ahl al-Haq (U.S. Department of State, 2023). Selain itu, Iran memiliki sekutu di Suriah yang juga menjadi rute strategis dalam memasok senjata ke Hizballah yang menjadi kelompok proxy teroris utama Iran. Israel juga turut melaporkan bahwa Iran membantu kelompok teroris untuk menciptakan infrastruktur yang memungkinkan produksi roket serta rudal dalam negeri dan menyediakan biaya ratusan juta dolar untuk melatih pejuang di kamp-kamp Iran (U.S. Department of State, 2023). Dukungan Iran terhadap kelompok teroris terus berlanjut yaitu pada Hamas di Palestina yang melancarkan serangan di Gaza dan Tepi Barat. Iran juga memberikan peralatan canggih sistem pesawat tak berawak pada militant Houthi yang seringkali melakukan serangan regional dengan total 1.700 senapan dan 170 rudal (U.S. Department of State, 2023).

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, kepercayaan AS terhadap Iran menurun oleh karena Iran dekat dengan berbagai kelompok teroris. Melalui Perjanjian Abraham, negara–negara Arab, Israel, dan AS mampu melakukan kerja sama dalam hal kontraterorisme, yakni dalam hal keamanan (The Abraham Accords, 2020). Upaya kooperatif ini dilakukan untuk melawan ancaman bersama yang berangkat dari kekhawatiran dukungan proxy di Timur Tengah oleh Iran. Mengingat terorisme merupakan kejahatan yang lintas batas negara diperlukan kerja sama pembagian informasi terkait dengan aktivitas, jaringan, dan pendanaan teroris yang diintegrasikan melalui Perjanjian Abraham sehingga mampu mencegah kegiatan terorisme dengan baik dan berkontribusi pada keamanan kawasan secara keseluruhan. Dalam hal ini, kerangka kerja sama regional yang lebih efektif diciptakan untuk langkah kontraterorisme.

Peningkatan Reputasi Donald Trump dalam Pemilu 2020

Berkenaan dengan menjelangnya pemilihan umum AS di tengah kondisi dunia yang mengalami pandemi COVID-19, Pew Reseach Center melakukan riset dengan jangka waktu 27 Juli hingga 2 Agustus 2020. Hasil riset menunjukkan bahwa terdapat beberapa isu yang menjadi fokus utama dalam pemilihan presiden 2020. Delapan dari

sepuluh pemilih terdaftar (79%) mengatakan bahwa sektor ekonomi menjadi faktor penting yang mendasari siapa yang akan mereka dalam pemilihan presiden 2020. Hal ini juga didukung oleh sektor kesehatan yang vital dengan persentase 68%, diikuti dengan penunjukkan Mahkamah Agung dengan persentase 64%, dan wabah virus COVID-19 dengan persentase 62% (Pew Research Center, 2020). Di sisi lain, AS di bawah pemerintahan Donald Trump menunjukkan ketidakmampuannya dalam mengatasi COVID-19 secara efektif meskipun telah banyak peringatan (Parker & Eric K. Stern, 2022). Donald Trump cenderung meremehkan ancaman COVID-19 dengan respon lambat dan kelola yang salah.

Jika ditarik ulur ke tahun 2020 dimana dunia mengalami pandemi, popularitas Donald Trump sendiri mengalami penurunan. Kebijakan kesehatan yang dikeluarkan Donald Trump justru mengalami kegagalan dan memunculkan perpecahan sosial. Hal ini disebabkan oleh kemarahan masyarakat AS yang berpenghasilan menengah ke bawah yang menganggap Donald Trump mengeksploitasi mereka dan justru menguntungkan orang berpenghasilan tinggi dan perusahaan (Woolhandler & all, 2017). Pemerintahan Donald Trump dinilai lambat dalam mengatasi COVID-19 sejak diumumkannya kasus perdana di AS pada 21 Januari 2020 dan sebagai darurat kesehatan global oleh *World Health Organization* (WHO) (Parker & Eric K. Stern, 2022). Tiga bulan setelahnya, AS baru mendeklarasikan *national emergency* pada 13 Maret 2020. Akibat daripada sikap lambat tersebut, peluang untuk menahan penyebaran virus melalui pengujian, pelacakan kontrak, dan isolasi sejak kasus perdana terkonfirmasi di AS terlewatkan. Diketahui sebanyak 400.00 kasus kematian akibat COVID-19 pasca Donald Trump meninggalkan jabatannya (Redlener & all, 2020). Kasus ini dianggap sebagai kegagalan karena para peneliti menyimpulkan bahwa sekitar 40% kasus kematian ini dapat dihindari. Laporan Universitas Columbia memperkirakan bahwa sekitar 130.000 hingga 210.000 kematian disebabkan oleh kegagalan pemerintahan AS (Redlener & all, 2020).

Kegagalan kepemimpinan Donald Trump dalam sektor kesehatan juga berimplikasi bagi sektor ekonomi dimana perekonomian negara turun drastis akibat kelambatan mengatasi COVID-19. Pada bulan April 2020, tingkat pengangguran meningkat pesat mencapai 14,7% dimana pada Februari hanya mencapai 3,5% (Zamarrita, 2020). Dampak lainnya yaitu lebih dari 20 juta masyarakat AS tidak lagi menerima bantuan \$600 sebagai tunjangan kerja sehingga membuat lebih banyak orang tidak mampu membayar sewa dan menimbulkan isu kelaparan (Reich, 2020). Selain itu, dalam bidang transportasi, hiburan, dan rekreasi masing-masing mengalami penurunan sebesar 24%, 24%, dan 9% (Reich, 2020). Ekonomi AS semakin parah ketika memasuki kuartal keempat tahun 2019 dan terus berlanjut hingga AS mengalami penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) paling tajam sebesar 9,1% dalam dua kartal

berturut-turut pada tahun 2020 (Bauer & all, 2020).

Peneliti melihat bahwa ekonomi AS membaik di tiga tahun kepemimpinan Donald Trump namun menjadi bencana ketika ia gagal mengatasi COVID-19 yang menyebabkan kerusakan ekonomi serius. Kebangkitan ekonomi sebelum COVID-19 terlihat dimana angka pengangguran yang rendah, pasar saham yang meningkat, dan ekonomi yang kuat. Hal tersebut yang menjadi bahan kampanye Donald Trump dalam pemilihan presiden tahun 2020. Hal ini dia pertegas melalui pidato kenegaraannya pada 4 Februari 2020 dengan mengatakan “*Jobs are booming, incomes are soaring, poverty is plummeting, crime is falling, confidence is surging, and our country is thriving ... America's fortunes are on the rise, and America's future is blazing bright*” (Parker & Eric K. Stern, 2022). Berkaitan dengan hal ini, peneliti berargumen bahwa reputasi yang telah dibentuk Donald Trump, terutama melalui ekonomi, telah hancur akibat COVID-19. Kegagalannya dalam mengatasi COVID-19 berimplikasi secara signifikan terhadap ekonomi AS yang anjlok dan dampak masif lainnya. Donald Trump justru memiliki reputasi buruk di dua sektor utama yaitu ekonomi dan kesehatan yang menjadi fokus utama dalam pemilihan presiden 2020. Maka peneliti melihat Donald Trump berusaha untuk menciptakan pembangunan reputasi di sektor keamanan, yaitu melalui Perjanjian Abraham dengan memanfaatkan sisa waktu jabatannya.

Donald Trump melalui Perjanjian Abraham membuka peluang lainnya yang bertujuan untuk menghimpun kembali suara untuk pemilihan presiden. Ia kemudian berusaha menurunkan sentimen buruk terkait ras, gender, dan agama dengan membangun reputasinya yang mendukung kebebasan beragama. Perjanjian Abraham memberikan kesempatan bagi Donald Trump untuk melakukan pembangunan peran sebagai pembawa damai (*dealmaker*) dan mediator yang sukses dalam dunia internasional. Dalam hal ini, Donald Trump juga berusaha menciptakan suatu kebijakan yang dapat diwariskan yang mana juga menjadi pengakuan bahwa ia menjadi pemimpin yang efektif di kawasan Timur Tengah. Berkat perjanjian ini, Christian Tybring Gjedde menyarankan penominasian Donald Trump pada 2018 untuk menerima *the 2021 Nobel Peace Prize* yang tentu akan menjadi faktor pendorong dalam pemilihan presiden (Douglas, 2020). Donald Trump menjadi dihormati akibat Perjanjian Abraham sebagai aktor utama dalam perjanjian.

Peneliti berargumen bahwa Donald Trump menggunakan Perjanjian Abraham sebagai strategi kunci kampanye oleh karena perjanjian ini dianggap sebagai kemenangan langka bagi diplomasi AS di Timur Tengah untuk menengahi Israel dengan negara-negara Arab hingga mencapai normalisasi hubungan diplomatik (Holland, 2020). Terlebih lagi sedikit presiden AS yang menjadi perantara dan berhasil mengusahakan perdamaian di Timur Tengah meski beberapa presiden telah mencoba (Norlen & Sinai, 2020). Trump menyebut perjanjian ini sebagai *huge breakthrough*

setelah empat puluh sembilan tahun Israel berada dalam kondisi perang dingin dengan negara – negara Arab.

Pemilihan presiden di AS juga memainkan aspek agama sebagai peran penting, tak terkecuali Donald Trump yang berasal dari Partai Republik. Berdasarkan riset yang dilakukan Pew Research Center dan data yang telah disajikan, para pemilih Donald Trump untuk tahun 2020 sebagian besar berasal dari kelompok *White Evangelical Christian* dengan presentase 59%. Hasil risetnya juga menyatakan bahwa pemilih yang sering hadir dalam ibadah (setidaknya hadir setiap bulan) lebih cenderung memilih kandidat dari partai Republik. Kelompok *White Evangelical Christian* sendiri merupakan kelompok konservatif Kristen yang termasuk dalam Partai Republik dan keberadaannya cukup berpengaruh yaitu sekitar 24% atau sekitar 40-60 juta penduduk di AS.

Berdasarkan *survey* oleh Pew Research Center, kelompok ini bahkan lebih kuat mendukung Israel dibandingkan Yahudi AS, yakni sekitar 82% (Pew Research Center, 2022). Dukungan terhadap Israel ini sangat berkaitan erat dengan agama dimana kelompok *White Evangelical Christian* percaya bahwa Tuhan memberikan Israel kepada orang Yahudi. Kelompok ini juga memiliki pandangan dimana tidak ada cara bagi Israel dan Palestina untuk hidup damai berdampingan (Pew Research Center, 2022). Dengan demikian dukungan kelompok ini sangat tinggi hingga mampu memainkan peran vital. Selain itu, kelompok *White Evangelical Christian* yang tergabung dalam Partai Republik, sekitar 66%, memandang pemerintahan Israel jauh lebih baik daripada pemerintahan Palestina (Pew Research Center, 2022). Oleh karena dukungan suara Donald Trump bergantung pada kelompok tersebut, kebijakan luar negeri yang diusahakan oleh AS di bawah kepemimpinannya cenderung pada Israel.

Penjualan Senjata AS JSF-35 pada UEA

Posisi UEA sebagai mitra keamanan di Timur Tengah turut menjaga kepentingan AS dalam hal kontraterorisme, kontraproliferasi, dan menahan pengaruh Iran. Guna menahan ancaman tersebut maka UEA harus mengembangkan dan melakukan modernisasi militer baik udara, darat, maupun laut. UEA sendiri mendapatkan julukan '*Little Sparta*' dan telah bekerja sama dengan AS dalam hal perencanaan strategis, dukungan logistik, latihan bersama, dan operasi tempur (Phillips & all, 2020). Sebelumnya, AS berturut-turut telah menjual senjata ke UEA sejak tahun 1980an, yaitu jet tempur F-16, sistem rudal pertahanan udara Patriot, dan sistem rudal terminal *high altitude area defense*.

Pada 10 November 2020, Departemen Luar Negeri AS di bawah kepemimpinan Donald Trump menginformasikan pada Kongres bahwa penjualan senjata pertahanan

senilai \$23,4 miliar yang terdiri dari F-35 *Joint Strike Fighter* (JSF), drone bersenjata, dan amunisi kepada UEA telah disetujui (Phillips & all, 2020). Kongres memiliki 30 hari sejak tanggal pemberitahuan untuk meninjau penjualan yang diusulkan dan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kontrol Ekspor Senjata. Salah satu yang turut menjadi pertimbangan Kongres yaitu UEA merupakan negara yang terlibat dalam Perjanjian Abraham dan menjadi sukutu AS yang menghadapi peningkatan kekuatan oleh Iran (Phillips & all, 2020).

UEA sebagai sekutu AS, sebenarnya telah lama menyatakan minatnya terhadap pesawat tempur milik AS. UEA kemudian diberikan janji untuk dapat membeli senjata AS apabila terlibat dalam normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Setelah resminya penandatanganan Perjanjian Abraham pada 15 September 2020, Menteri Luar Negeri AS saat itu, Mike Pompeo, mengumumkan persetujuan penjualan senjata AS ke UEA dengan total nilai sebesar \$23.37 miliar melalui perincian 50 pesawat F-35 JSF senilai \$10.4 miliar, 18 MQ-9B *Reaper Unmanned Aerial* Sistem senilai \$2.97 miliar, dan paket amunisi udara senilai \$10 miliar (Defense Security Cooperation Agency, 2020). F-35 JSF sendiri merupakan pesawat tempur siluman multi-peran yang paling dominan di dunia dimana mampu terbang dengan kecepatan supersonik dan dilengkapi sensor *on-board* yang memberikan pandangan komprehensif bagi pilot (Leaf & Stroul, 2020). Dengan adanya pembelian senjata AS, maka pertahanan diri UEA meningkat serta memiliki kapasitas untuk mencegah agresi di wilayah regional dan menjaga keamanan terutama dari Iran (Defense Security Cooperation Agency, 2020).

Iran menjadi ancaman oleh karena kepemilikan persenjataannya yang mumpuni, seperti armada pesawat tak berawak, sistem rudal yang canggih, termasuk sistem pertahanan udara S-300 Rusia. Pada 18 Oktober 2020, embargo senjata terhadap Iran oleh PBB resmi berakhir dan memberikan kesempatan bebas pada Iran untuk melakukan pembelian atau penjualan senjata konvensional (Wintour, 2020). Dengan berakhirnya embargo senjata tersebut, Iran mampu melakukan penambahan senjata militer, terutama dari dua negara yaitu Rusia dan China yang siap menawarkan persenjataan pada Iran (Wintour, 2020). Atas dasar berakhirnya embargo Iran serta kedekatannya dengan Rusia dan China, peneliti menilai bahwa hal tersebut menjadi salah satu dasar mengapa permintaan F-35 JSF oleh UEA kemudian dikabulkan, yakni untuk menyeimbangkan militer Iran. AS berdalih bahwa kesepakatan tersebut tidak menimbulkan perlombaan senjata baru tetapi akan membantu UEA dalam meningkatkan perlombaan senjata antara UEA dan Iran (Leaf & Stroul, 2020). Di sisi lain, kesepakatan penjualan pesawat ini memberikan sinyal bahwa AS memiliki kepercayaan tinggi dan komitmen terhadap UEA. Namun, kesepakatan penjualan senjata ini baru dapat direalisasikan dengan mempelajari bagaimana hal tersebut tidak bertentangan dengan Israel (Stone, 2020).

AS juga harus menghormati kesepakatan berpuluh-puluh tahun sebelumnya dengan Israel dimana setiap senjata yang AS jual ke wilayah Timur Tengah tidak boleh mengganggu keunggulan kualitas militer Israel. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan di cabang eksekutif dan legislatif (Leaf & Stroul, 2020). AS juga harus memberikan jaminan bahwa senjata yang dijual kepada Israel lebih unggul dibandingkan dengan senjata yang dijual ke negara lain (Stone, 2020). Berkenaan dengan hal itu, AS mempelajari bagaimana cara untuk membuat F-35 JSF dapat terlihat oleh radar Israel. Dalam hal ini, diusahakan agar pertahanan udara Israel dapat mendeteksi F-35 JSF milik UEA dengan teknologi yang secara efektif mampu mengalahkan pesawat tersebut. Selain itu, AS juga turut memastikan bahwa pesawat yang dijual pemerintah AS tidak menandingi kinerja pesawat AS (Defense Security Cooperation Agency, 2020).

Peneliti melihat bahwa kepentingan AS melalui Perjanjian Abraham dalam hal persenjataan terlihat melalui penjualan pesawat tempur F-35 JSF, juga untuk mempertahankan pasar persenjataan AS di Timur Tengah dan mendukung pertumbuhan ekonomi industri pertahanan AS. F-35 JSF sendiri menjadi kontributor signifikan bagi perekonomian AS dari Departemen Pertahanan. Program ini telah mengirimkan lebih dari 840 pesawat tempur dan saat ini dijadwalkan untuk pengiriman 2.400 lebih pesawat ke pasukan AS dan negara lain (AeroDynamic Advisory, 2022). Begitu pula dengan pesanan UEA, AS mendapatkan pendapatan signifikan sebab F-35 JSF memiliki label harga yang tinggi. Lockheed Martin sebagai kontraktor utama memperkirakan total dampak ekonomi positif AS melalui penjualan F-35 JSF mencapai \$65 miliar per tahunnya, termasuk di dalamnya aktivitas produksi serta perakitan yang mencapai \$30 miliar (AeroDynamic Advisory, 2022). Program F-35 JSF juga mendukung terbukanya lapangan pekerja terhadap tenaga kerja melingkupi berbagai tahap, yakni produksi, rekayasa, perakitan, pengujian, dan pemeliharaan. Hal ini membuktikan bahwa program ini menjangkau ekonomi dengan sangat luas bahkan hampir melibatkan berbagai industri pendukung seperti pemasok komponen, pengembang perangkat lunak, serta penyedia layanan (AeroDynamic Advisory, 2022). Permintaan F-35 JSF berkelanjutan dapat mempertahankan peluang kerja dan memberikan keuntungan bagi industri pertahanan yang berkontribusi bagi stabilitas perekonomian AS secara keseluruhan. Selain itu, AS juga turut meningkatkan reputasi dan daya jual produk pertahanan AS di pasar global melalui penjualan tersebut.

Namun jika ditelaah lebih jauh, peneliti juga melihat bahwa AS berusaha untuk menghalau pengaruh China di Timur Tengah melalui F-35 JSF ini. China juga memanfaatkan penjualan senjata sebagai cara untuk menantang dominasi pasar dan berusaha merusak kemitraan AS di Timur Tengah (Leaf & Stroul, 2020). Pentagon pada tahun 2020 merilis laporan bahwa China melakukan ekspansi dalam bidang

militer dimana China mempertimbangkan pembangunan fasilitas logistik militer di UEA untuk mendukung operasi militernya (Leaf & Stroul, 2020). Pangkalan militer ini diyakini memainkan peran sebagai strategi China untuk mengganggu keunggulan militer AS dan sebagai media dalam melakukan spionase.

Tujuan Implisit AS dalam Perjanjian Abraham Melalui Perilaku AS

Dalam bagian ini, peneliti mengobservasi dan mengidentifikasi tujuan yang sebenarnya ingin dicapai oleh AS melalui tindakan AS alih-alih percaya sepenuhnya terhadap tujuan eksplisit Perjanjian Abraham. Peneliti melihat bahwa tujuan-tujuan implisit ini didukung penuh oleh faktor kepentingan nasional AS di Timur Tengah. Hal tersebut yang menjadi dasar akan tindakan AS dalam Perjanjian Abraham. Tujuan dan kepentingan nasional diibaratkan sebagai sesuatu yang saling berdampingan dimana kepentingan nasional turut menjadi pengaruh dalam penentuan tujuan AS dalam Perjanjian Abraham di Timur Tengah.

Peneliti menemukan bahwa alih-alih percaya terhadap deklarasi Perjanjian Abraham sebagai perjanjian damai, lebih cocok apabila disebutkan sebagai perjanjian normalisasi Israel dengan negara-negara Arab. Hal tersebut didasarkan terhadap peristiwa konflik berkelanjutan yang berkaitan dengan Israel di regional yaitu konflik wilayahnya dengan Palestina (Dekhakhena, 2021). Perjanjian ini tidak melibatkan Palestina dalam realisasinya sebagai perjanjian damai. Oleh karena itu, peneliti berargumen bahwa apabila bertujuan untuk menciptakan perdamaian maka seharusnya AS turut berfokus dan melibatkan Palestina. Dengan demikian, perjanjian ini tidak memiliki fokus terhadap perdamaian dimana hal ini dipertegas oleh fakta bahwa Israel tidak memiliki hubungan perang dengan empat negara Arab yang terlibat dalam perjanjian.

Di sisi lain, peneliti juga justru melihat perjanjian ini menjadi media untuk memperkuat posisi Israel di kawasan. Penguatan posisi Israel oleh AS tersebut disebabkan oleh karena adanya pengakuan Israel sebagai suatu negara sebagaimana persyaratan dalam Perjanjian Abraham oleh negara-negara Arab yang terlibat di dalamnya, dimana sebelumnya telah dijelaskan bahwa pengakuan Israel sebagai suatu negara melanggar nilai *Arab Peace Initiative*. AS, dalam hal ini, terus mendorong negara-negara Arab untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel untuk mengusahakan perbaikan hubungan yang sebelumnya mengalami ketegangan. Perjanjian Abraham tidak hanya memberikan keuntungan terhadap Israel dan negara-negara Arab. AS juga turut mendapatkan keuntungan yang telah dibahas dalam bagian kepentingan nasional. Hal ini didasarkan pada doktrin *America First* yang dianut dalam pemerintahan Donald Trump, dimana AS tidak akan terlibat lebih jauh apabila tidak

mendapatkan keuntungan bagi AS, terutama dalam sektor ekonomi.

Selain itu, posisi Israel sebagai satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah turut menjadi dasar penguatan negara ini. Donald Trump melalui pidatonya menyatakan “*our great friend and the one true Democracy in the Middle East*” (Reuters, 2016), mengakui bahwa Israel merupakan sekutu yang kuat dan satu-satunya negara demokrasi yang harus dipertahankan di kawasan ini sehingga perlu mengamankan keberadaan Israel. Tujuan mempertahankan posisi Israel dengan melibatkan negara-negara Arab merupakan cara AS untuk mencapai kepentingan-kepentingan yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Di sisi lain, hal ini menunjukkan bahwa Donald Trump seolah mengabaikan *two states solution* yang sebelumnya ingin dicapai (Dekhakhena, 2021).

AS yang bertindak sebagai penjamin dalam perjanjian ini juga merealisasikannya dalam bentuk transaksional. Artinya, setiap negara Arab yang berkeinginan terlibat dalam Perjanjian Abraham dan mau melakukan kehendak AS maka akan diberikan imbalan. Pandangan terhadap AS sebagai *great power* oleh negara-negara Arab menunjukkan bahwa pengaruh AS di Timur Tengah masih diakui. Dengan kapabilitas besar yang dimiliki negara besar seperti AS, maka tujuan dan kepentingan yang ingin dikejar jauh lebih luas jika dibandingkan dengan negara kecil (Lantang & Purnama, 2023). Dalam hal ini, AS tidak hanya memperkuat posisi Israel tetapi juga posisinya sendiri sebagai mediator perjanjian dan pemain kunci di Timur Tengah.

Dalam hal ini, AS sebagai aktor besar dibalik perjanjian ini mampu memenuhi kepentingan negara-negara Arab. Jika dilihat dari sisi negara-negara Arab dan Israel, peneliti berargumen bahwa tujuan negara-negara Arab yang terlibat dalam perjanjian yaitu untuk menjadi sekutu AS. Salah satu bentuk tujuan yang ingin dikejar terlihat pada UEA dimana menjadi salah satu negara yang mendekati AS untuk mendapatkan akses pembelian senjata dan disetujui pasca penandatanganan Perjanjian Abraham. Keinginan tersebut didorong oleh motivasi UEA untuk meningkatkan posisi negaranya dalam dunia internasional (Mazzucco & Alexander, 2022). Selain itu, AS juga memberikan pengakuan kedaulatan Maroko atas Sahara Barat pada 10 Desember 2020, wilayah sengketa yang diperebutkan oleh Maroko dan Front Polisario (Dahir, 2021). Terakhir, Sudan juga mendapatkan keuntungan dari Perjanjian Abraham oleh AS yaitu penghapusan Sudan dari daftar negara sponsor teroris dan memberikan Sudan pinjaman sebesar \$1 miliar untuk melunasi hutang ke *World Bank* (Mohiedeen, 2021).

Selain penguatan Israel sebagai tujuan implisit AS dalam perjanjian Abraham, peneliti juga melihat bahwa perjanjian ini ditujukan untuk menghalau ancaman AS di Timur Tengah, yakni Iran, sekaligus mengurangi risiko kerusakan fisik dan dana yang

harus ditanggung AS. Perjanjian Abraham secara tidak langsung membentuk front perlawanan terhadap Iran yang kuat oleh karena setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki pandangan yang sama yaitu memandang Iran sebagai ancaman. Persamaan tantangan dan perspektif inilah yang kemudian menjadi salah satu dorongan untuk negara-negara Arab menghadapi tantangan regional Iran dan menjaga kepentingan keamanan mereka. Oleh karena itu, hubungan kedekatan diantara mereka semakin meningkat oleh karena faktor ancaman dan penguatan posisi Israel di kawasan juga memengaruhi eksistensi AS di Timur Tengah untuk menjaga stabilitas Timur Tengah, terutama terhadap ancaman Iran.

Keberadaan Iran di kawasan mengkhawatirkan sebab Iran tetap melanjutkan produksi nuklir secara diam-diam meski telah diatur dalam JCPOA. Selanjutnya, tindakan Iran di kawasan diyakini mengganggu kepentingan dari AS sehingga dalam konteks Perjanjian Abraham, ketegangan antara Iran dan AS meningkat ketika perjanjian tersebut dilaksanakan. AS dalam hal ini berusaha melindungi kepentingan nasionalnya sendiri, sekutu utama Israel, dan negara-negara Arab dalam perjanjian. Bagi AS, perlu untuk mengusahakan perlawanan dengan memanfaatkan negara-negara Arab sendiri untuk melawan Iran sebab AS ingin mengurangi beban AS di Kawasan Timur Tengah. Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa tujuan implisit lainnya yaitu untuk mengimbangi pengaruh Iran dan mempersiapkan segala tantangan yang dapat muncul oleh karena tindakan Iran di kawasan.

Peneliti juga berargumen bahwa Perjanjian Abraham sebagai kebijakan luar negeri menjadi *trade-off* dari Donald Trump dan *White Evangelical Christian* yang menjadi bagian dalam Partai Republik. Kelompok *White Evangelical Christian* cenderung berpihak pada Israel sehingga kebijakan luar negeri AS yang condong pada Israel lebih disukai. Pada akhirnya, peneliti melihat bahwa AS kurang tertarik untuk benar-benar mengusahakan resolusi konflik di Timur Tengah melalui Perjanjian Abraham melainkan terus memastikan bahwa posisi Israel di kawasan Timur Tengah semakin kuat dan bahwa kekuatan Iran di regional dapat terhambat melalui Perjanjian Abraham sehingga AS dapat mengusahakan tercapainya kepentingan nasional dan kepentingan politik Donald Trump di penghujung pemerintahannya.

Kesimpulan

Perjanjian Abraham merupakan kebijakan luar negeri AS yang dikeluarkan pada tahun 2020, menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Donald Trump. AS dalam hal ini mencari kesamaan antara tiga agama yaitu Kristen, Islam, dan Yahudi dimana pemilihan nama Abraham oleh AS sendiri menjadi bagian penting untuk meningkatkan ikatan persaudaraan antara Israel dan negara-negara Arab. Pemilihan

nama tersebut diharapkan mampu mengurangi tensi hubungan diantara semua pihak. AS dalam Perjanjian Abraham secara eksplisit menyatakan bahwa perjanjian ini merupakan upaya perdamaian untuk menciptakan kondisi Timur Tengah yang sejahtera.

AS di masa pemerintahan Donald Trump semakin giat dalam menjalankan kebijakan luar negeri dengan berdasarkan kepada doktrin *America First* sehingga kebijakan luar negeri ini harus mampu memenuhi kepentingan nasional AS. Dalam perjanjian ini AS memiliki posisi strategis sebagai mediator dan fasilitas perjanjian serta melakukan ekspansi perjanjian ini. Oleh karena itu, peneliti berargumen bahwa terdapat tujuan-tujuan lainnya yang ingin dicapai oleh AS, alih-alih percaya kepada tujuan yang dideklarasikan secara publik. Berdasarkan hasil telaah peneliti, terdapat perbedaan antara tujuan yang disampaikan dengan tujuan yang sebenarnya ingin dikejar melalui perilaku AS dalam Perjanjian Abraham. AS memiliki kepentingan tersendiri yang menguntungkan dalam perjanjian ini, yaitu pembentukan aliansi non-formal dalam menghadapi ancaman Iran, peningkatan reputasi Donald Trump dalam pemilihan umum, dan penjualan senjata F-35 JSF kepada UEA. Kepentingan-kepentingan inilah yang kemudian peneliti lihat sebagai kendali dalam menilai tujuan AS dalam Perjanjian Abraham.

Alih-alih berfokus pada tujuan mencapai perdamaian Timur Tengah, peneliti justru menemukan bahwa AS memiliki tujuan lain yang tidak disampaikan secara eksplisit. Tujuan implisit AS dalam Perjanjian Abraham yang ditemukan peneliti yaitu penguatan posisi Israel sebagai sekutu utama AS di kawasan yang berguna untuk menjaga stabilitas kawasan dan pengaruh AS di Timur Tengah, menghalau pertumbuhan pengaruh Iran yang dianggap sebagai ancaman regional, dan mempertahankan dukungan suara dari kelompok *White Evangelical Christian* bagi Donald Trump untuk pemilihan umum 2020. Peneliti kemudian membagi ketiga tujuan tersebut sesuai dengan jangka waktu dimana tujuan menjaga stabilitas dan pengaruh AS di kawasan dan menghalau pertumbuhan pengaruh Iran merupakan tujuan implisit jangka panjang. Sedangkan, tujuan dalam mempertahankan dukungan suara bagi Donald Trump merupakan tujuan jangka pendek.

Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa Perjanjian Abraham menjadi tempat *trade-off* kelompok *White Evangelical Christian* dan Donald Trump dimana kebijakan yang memihak pada Israel merupakan upaya untuk mendapatkan suara dari kelompok tersebut. Selain itu, peneliti juga melihat bahwa tujuan-tujuan ini tidak dinyatakan secara publik untuk menjaga nama baik AS sebagai mediator perjanjian yang berhasil dan menjaga kerahasiaan sehingga tujuan tersebut dapat tercapai dengan langkah pasti tanpa harus memberitahu rencana AS dalam Perjanjian Abraham.

Daftar Pustaka

- Abraham Accords Peace Initiative. (2023). Dawn Of A New Era.
- Advisory, Aerodynamic. (2022). *Evaluating The Economic Impact Of The F-3*.
- Ahmed, Mansoor. (2021). *President Trump's Foreign Policy Towards the Middle East (2016-20): A Critical Analysis*. Pakistan Journal of American Studies
- Alon, Ilai; Bar-Tal, Daniel. (2016). *The Role of Trust in Conflict Resolution: The Israeli-Palestinian Case and Beyond*. Gewerbestrasse: Springer Nature
- Alper, Becka A. (2022). *Pew Research Center: Modest Warming in U.S. Views on Israel and Palestinians*. <https://www.pewresearch.org/religion/2022/05/26/modest-warming-in-u-s-views-on-israel-and-palestinians/>
- Anderlin, Sanam Naraghi. (2014). *Peace Negotiations and Agreements*. The International Civil Society Action Network (ICAN). https://www.inclusivesecurity.org/wp-content/uploads/2012/04/37_peace_negotiations.pdf
- Arab Center for Research and Policy Studies. (2020). *'Deal of the Century': What Is It and Why Now?*. <https://arabcenterdc.org/resource/deal-of-the-century-what-is-it-and-why-now/>
- Arbar, Thea Fathanah. (2022). *Ini Deretan Negara Arab yang Akhirnya Damai dengan Israel*. CNBC Indonesia. [cnbcindonesia.com/news/20220715080346-4-355820/ini-deretan-negara-arab-yang-akhirnya-damai-dengan-israel](https://www.cnbcindonesia.com/news/20220715080346-4-355820/ini-deretan-negara-arab-yang-akhirnya-damai-dengan-israel)
- Arvy Chrisando Lantang dan Chandra Purnama. (2023). *Sumber Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dibalik Penandatanganan Abraham Accords*. Universitas Padjajaran.
- Avi, Shlaim. (2001). *The Iron Wall, Israel and The Arab World*. W.W Norton and Company.
- Balaji. (2023). *Abraham Accords*. <https://byjusexamprep.com/upsc-exam/abraham-accord>
- Baron, Robert., Hamasaeed, Sarhang., Ellenbogen, Lucy Kurtzer., Michael Yaffe., Youssef, Hesham. (2022). *Five Takeaways from Biden's Visit to the Middle East*. US Institute of Peace
- Bauer, Lauren; all, et. (2020). *Ten Facts About COVID-19 and the U.S. Economy*. The Hamilton Project
- Beaumont, Peter. (2019). *Iran has enriched uranium past key limit, IAEA confirms*. <https://www.theguardian.com/world/2019/jul/08/iran-has-enriched-uranium-past-key-limit-iaea-confirms>
- Belmontem Nerea. (2022). *Saudi Arabia, next in line for the Abraham Accords?*. Atalayar Between Two Shores, <https://www.atalayar.com/en/articulo/politics/saudi-arabia-next-line-abraham-accords/20220602144903156721.html>
- Berman, Lazar. (2021). *Israeli envoy reopens Morocco liaison office after 20 years*. <https://www.timesofisrael.com/israeli-envoy-reopens-morocco-liaison-office-20-years-later/>
- Bermant, Azriel. (2023). *The Abraham Accords: A Gamechanger for the Region and Europe's Role in It?*. Institut of International Relations Prague
- Brader, Jonathan. (2020). *The Abraham Accords*. CQ Researcher. <https://library.cqpress.com/cqresearcher/document.php?id=cqresrre2020121100>
- Brakel, Alexander; Barak, Mitchell. (2020). *Measuring the Attitudes of Citizens in Israel, UAE, Bahrain, Palestinian Authority, Saudi Arabia, Qatar, Morocco, United States, and*

- Germany Towards the Israel-UAE-Bahrain Peace Accords*. Konrad Adenauer Stiftung and Keevoon Global Research
- Brands, Hal. (2016). *The Limits of Offshore Balancing*. Strategic Studies Institute
- Butt, Shiza Ahmed. (2022). *Abraham Accords: Strategic Realignment*. A Journal of Strategic Studies
- Cafiero, Giorgia. (2023). *Though normalization unlikely, Saudi relations with Israel continue to flourish*. <https://amwaj.media/article/though-normalization-unlikely-saudi-relations-with-israel-continue-to-flourish>
- Callahan, D. (1998). *Unwinnable Wars: American Power and Ethnic Conflict*. New York: Hill and Wang
- Center, Pew Research. (2020). *Important issues in the 2020 election*. [https://www.pewresearch.org/politics/2020/08/13/important-issues-in-the-2020-election/#:~:text=About%20six%2Din%2Dten%20\(,very%20important%20to%20the%20vote\)](https://www.pewresearch.org/politics/2020/08/13/important-issues-in-the-2020-election/#:~:text=About%20six%2Din%2Dten%20(,very%20important%20to%20the%20vote))
- CNN Indonesia. (2021). *Israel Resmikan Kedutaan Besar di Bahrain*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210930192108-120-701747/israel-resmikan-kedutaan-besar-di-bahrain>
- CNN Indonesia. (2022). *Biden Tur ke Timur Tengah, Bawa Misi Dorong Israel-Arab Saudi Rujuk* <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220714122850-120-821432/biden-tur-ke-timur-tengah-bawa-misi-dorong-israel-arab-saudi-rujuk>
- Council on Foreign Affairs. (2022). *1953 – 2022 U.S. Relations With Iran*. <https://www.cfr.org/timeline/us-relations-iran-1953-2022>
- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications Inc.,
- Dahir, AL. (2021). *United States Recognizes Morocco's Sovereignty Over Western Sahara*. American Journal of International Law
- Defense Security Cooperation Agency. (2020). *United Arab Emirates – F-35 Joint Strike Fighter*. <https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/united-arab-emirates-f-35-joint-strike-fighter>
- Dekel, Udi; Yoel Guzansky. (2013). *Israel and Saudi Arabia: Is the Enemy of My Enemy My Friend?*. The Institute for National Security Studies
- Dekhakhena, Abdelkrim. (2021). *fuelling disdain: president trump's policy towards the israeli-palestinian conflict*. Journal of Islamic Jerusalem Studies
- Douglas, Elliot. (2020). *Trump nominated for Nobel Peace Prize*. <https://www.dw.com/en/donald-trump-nominated-for-the-2021-nobel-peace-prize/a-54864344>
- Dror, Elad Ben. (2007). *The Arab Struggle Against Partitions: The International Arena of Summer 1947*. Middle Eastern Studies
- Elliott, Larry. (2021). *Trump saw the economy was his ticket to a second term – then Covid struck*. <https://www.theguardian.com/business/2021/jan/15/trump-saw-the-economy-was-his-ticket-to-a-second-term-then-covid-struck>
- Elving, Ron. (2017). *Trump Vows Policy Vision Of 'America First,' Recalling Phrase's*

- Controversial Past*. NPR <https://www.npr.org/2017/01/21/510877650/trump-vows-policy-vision-of-america-first-recalling-phrases-controversial-past>
- Embassy, UEA. (2023). *The Abraham Accords: A Warm Peace Transforming The Middle East*. <https://www.uae-embassy.org/discover-uae/foreign-policy/abraham-accords-warm-peace-transforming-middle-east>
- European Union. (2021). *League of Arab States (LAS)*. https://www.eeas.europa.eu/eeas/league-arab-states-las_en
- Fakhriansyah, M. (2023). *Diam-Diam Arab Saudi Kerja Sama dengan Israel, Ini Buktinya*. CNBC Indonesia <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230126094118-4-408351/diam-diam-arab-saudi-kerja-sama-dengan-israel-ini-buktinya>
- Fatih, Tayfur. (1994). *Main Approaches to The Study of Foreign Policy: A Review, Department of International Relations*. Turkey: Middle East Technical University
- Fountain, Daniel. (2023). *Abraham Accords prove no such thing as 'permanent enemies,' says former Trump adviser Kushner*. <https://www.arabnews.com/node/2279116/middle-east>
- Fukuyama, Francis. (1992). *The End of History and the Last Man*. United States : The Free Press
- George, A.L., R. Keohane. (1980). *The Concept of National Interests : Uses and Limitations In Presidential Decision-Making in Foreign Policy*. Pp. 217–237. Boulder: Westview
- German Institute for Global and Area Studies (GIGA). (2020). *From New to Normal: Two Years after the Abraham Accords*
- Gordon, Philip. (2017). *Israel, the Arab States, and the Illusions of Normalization*. The Institute for National Security Studies
- Guzanky, Yoel. (2020). *Saudi Arabia and Normalization with Israel*. The Institute for National Security Studies
- Harmoush, Adel. (2021). *The Abraham Accords: Yesterday's foes, tomorrow's friends?*. Swedia: Linnaeus University
- Held, David., McGrew. Anthony., Goldblatt. David., Perration, Jonathan. (1999). *Global Transformations, Politics, Economics and Culture*. Stanford : Stanford University Press
- Hincks, Joseph. (2020). *Will Saudi Arabia Be Next to Normalize Relations with Israel? Don't Hold Your Breath, Experts Say*. <https://time.com/5890151/saudi-arabia-israel-abraham-accords/>
- Holland, Steve. (2020). *Trump scores diplomatic deal with Middle East allies before election*. <https://www.reuters.com/article/us-israel-emirates-trump-deal-idUSKCN2592XW>
- Huberman, Koby. (2022). *Israeli-Palestinian Peace: The Abraham Accords have created space for a radical transformation in our thinking*. Fathom Journal.
- Ilham, Muhammad. (2022). *Transaksionalisme Amerika Serikat dalam Normalisasi Hubungan Maroko-Israel*. Politela : Jurnal Pemikiran Politik Islam Vol 5, No 2 e-ISSN 2657-1560
- IMEU. (2022). *IMEU Policy Analysis #5: Abraham Accords Isolate Palestinians, Solidify*

- Israel's Apartheid Rule.* <https://imeu.org/article/imeu-policy-analysis-5-abraham-accords-isolate-palestinians-solidify-israel>. Indian Council of World Affairs
- Jackson, David. (2016). *Trump calls American foreign policy under Obama 'total disaster'*. <https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2016/04/27/donald-trump-foreign-policy-clinton-cruz-kasich/83584314/>
- Jazeera, Al. (2021). *'Human error': Inside Iran's report on downing of Ukraine plane.* <https://www.aljazeera.com/news/2021/3/17/human-error-inside-irans-report-on-the-downing-of-flight-ps75>
- Jazeera, Al. (2022). *Pegasus: What you need to know about Israeli spyware.* <https://www.aljazeera.com/news/2022/2/8/what-you-need-to-know-about-israeli-spyware-pegasus>
- Jeffrey, James Franklin. (2020). *The Trump Foreign Policy Legacy In The Middle East.* Transatlantic Policy Quarterly
- Joseph, Delma. (2022). *The Past, Present and Future of the Abraham Accords.*
- Kapucu, N.; Hu, Q. (2022). *An old puzzle and unprecedented challenges: coordination in response to the COVID-19 pandemic in the US.* Public Performance & Management Review
- Karman, Yongky. (2019). *The Inclusive Abraham: A Meeting Point of the Abrahamic-Religious Trialogue.* Jaffray Journal
- Kegley, Charles W.; Wittkopf, Eugene R. (2001). *World Politics: Trend and Transformation 6th Edition.* New York: St. Martin's Press
- Khalid, Asma. (2022). *Biden is building on the Abraham Accords, part of Trump's legacy in the Middle East.* NPR <https://www.npr.org/2022/07/09/1110109088/biden-is-building-on-the-abraham-accords-part-of-trumps-legacy-in-the-middle-eas>
- Krisdananjaya, Adhyaksa; Syauqillah, Muhamad. (2022). *Normalisasi Hubungan Negara-Negara Arab dengan Israel: Implikasi dan Dinamika dari Perjanjian Abraham.* Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
- Krusner, Stephen. (1978). *Defending the National Interest: Raw Materials Investments and US Foreign Policy.* Princeton: Princeton University Press.
- Kumoro, Bawono. (2009). *Hamas, Ikon Perlawanan Islam Terhadap Zionisme Israel.* Bandung: Mizan
- Lankford, James. (2022). *Lankford, Colleagues Launch Abraham Accords Caucus.* <https://www.lankford.senate.gov/news/press-releases/lankford-colleagues-launch-abraham-accords-caucus>
- Leaf, Barbara A.; Stroul, Dana. (2020). *The F-35 Triangle: America, Israel, The United Arab Emirates.* Texas National Security Review
- Lindsay, J.M. (1986). *Trade Sanctions Have Policy Instruments: A Re-Examination.* International Studies Quarterly 30 (2): Pp. 153–173.
- Louise, Fawcett. (2013). *International Relations of Middle East.* Oxford University Press
- Lowrey, Annie. (2020). *The Small-Business Die-Off Is Here.* <https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/05/bridge-post-pandemic-world-already-collapsing/611089/>

- Lynn, Carrie Keller. (2023). *Netanyahu: Peace with Saudis would be 'quantum leap'; could end Israel-Arab conflict*. https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/netanyahu-peace-with-saudis-would-be-quantum-leap-could-end-israel-arab-conflict/
- Mazzucco, Leonardo Jacopo Maria; Alexander, Kristian. (2022). *The Abraham Accords two years on: from ambition to reality*. Real Instituto Elcano Royal Institute
- Mcmanus, Doyle. (2016). *Opinion: Trump says he stands for 'America First.' What does that mean?*. <https://www.latimes.com/opinion/opinion-la/la-ol-trump-america-first-20160427-story.html>
- Mearsheimer, John J.; Walt, Stephen M. (2016). *The Case for Offshore*. Council on Foreign Relations
- Mekay, Emad. (2023). *Saudi Arabia and Israel quietly prepare 'deal of the century'*. <https://time.com/5890151/saudi-arabia-israel-abraham-accords/>
- Middle East Eye (MEE). (2020). *Trump says 'about five' countries are close to normalising ties with Israel*. <https://www.middleeasteye.net/news/trump-five-countries-close-normalising-israel>
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook 3rd Edition*. London : Sage Publications. Translated by Tjetjep Rohindi Rohidi. Universitas Indonesia Press.
- Mohiedeen, Naba. (2021). *Sudan Signs on to Abraham Accords, Normalizing Relations With Israel*. https://www.voafrica.com/a/africa_sudan-signs-abraham-accords-normalizing-relations-israel/6200455.html
- Morgenthau, H. (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: Knopf.
- Morin, Jean Frederic; Paquin, Jonathan. (2018). *Foreign Policy Analysis: A Toolbox*. Quebec: Palgrave Macmillan
- Myrvold, Christian Oscar Alexander Abrahamsen. (2020). *The Abraham Accords : A Comparative Perspective on American Foreign Policy in the Middle East*. Faculty of Humanities, Social Sciences and Education
- N. Sonnichsen. (2022). *Oil Production in the Middle East 1998-2021*. <https://www.statista.com/statistics/265200/middle-eastern-oil-production-in-barrels-per-day/>
- Norlen, Tova., Sinai, Tamir. (2020). *The Abraham Accords: Paradigm Shift or Realpolitik?*. George C.Marshall European Center for Security Studies No. 64 ISSN 1867-4119
- NSD. (2020). *Remarks by President Trump on Iran*. <https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-iran/>
- Onuf, N. (2001). *Speaking of Policy*. In *Foreign Policy in a Constructed World*, ed. V. Kubalkova, Pp. 77–95. Armonk: Sharpe.
- Oren, Michael B. (2003). *Six Days of War: June 1967 and The Making of Modern Middle East*. New York: Balantine Books.
- Paat, Vera. (2013). *Posisi Amerika Serikat dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel*. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*,

- Paquin, J., P. Beaugregard. (2015). *US transatlantic leadership after Iraq. Cooperation and Conflict* 50 (4): Pp. 510–530
- Parker, Charles F.; Eric K. Stern. (2022). *The Trump Administration and the COVID-19 crisis: Exploring the warning-response problems and missed opportunities of a public health emergency*. PubMed Central
- Phillipps, Graciela H. (2022). *Middle Eastern Defense: The Role of The Abraham Accords*. Liberty University
- Phillips, James; all, et. (2020). *F-35 Sale to UAE Advances*. The Heritage Foundation
- Politico. (2017). *Full text: 2017 Donald Trump inauguration speech transcript*. <https://www.politico.com/story/2017/01/full-text-donald-trump-inauguration-speech-transcript-233907>
- R.P. Barston. (2014). *Modern Diplomacy 4th Edition*. New York :Routledge. Pp. 275
- R.W.S Sumadinata; T.N Mursitama., D. Yulianti. (2019). *Intertwine Between Technology and Diplomacy: Indonesian E-Diplomacy Achieving Palestinian Independence*. European Union Digital
- Redlener, I; all, et. (2020). *130,000–210,000 avoidable Covid-19 deaths—and counting—in the US*. National Center for Disaster Preparedness
- Rehman, Aziz Ur. (2020). *Causes Behind the Abraham Accord and It's Consequences for the Peace Process in the Middle East*. The Middle East International Journal for Social Sciences Vol. 2 No.2
- Reich, Robert. (2020). *The painful truth about Covid and the economy – Trump is to blame*. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/aug/02/covid-19-coronavirus-us-economy-donald-trump-republicans>
- Reuters. (2016). *Trump's Washington foreign policy speech*. <https://www.reuters.com/article/us-usa-election-trump-speech-idUSKCN0XO2ID>
- Riechmann, Deb. (2019). *Trump's 'America first' policy to key in on foreign shores*. <https://apnews.com/article/iran-politics-europe-middle-east-religion-72008d8d52774fd3a1f6910c6333d120>
- RiteTag. (2018). *#maga Twitter Hashtag Analytics*. <https://ritetag.com/hashtag-stats/maga>
- Robinson, Kali. (2022). *What Is the Iran Nuclear Deal?*. Council on Foreign Relations
- Robinson, Linda. (2022). *Examining the U.S. Interest in Regional Security Cooperation in the Middle East and North Africa: Opportunities, Obstacles, and Objectives*. Center for Middle East Public Policy
- Rosenau, J.N. (1971). *Toward the Study of National-International Linkages In The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: Free Press.
- Rosenau, James N.; Boyd, Gavin; Thompson, Kenneth W. (1976). *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press
- Schneider, Bradlet Scott. (2022). *Commemorating the second anniversary of the signing of the Abraham Accords Declaration*. <https://www.congress.gov/117/bills/hres/1359/BILLS-117hres1359ih.pdf>
- Sherman, Jake. (2017). *POLITICO/Morning Consult Poll: Voters liked Trump's 'America*

- first' address.* <https://www.politico.com/story/2017/01/poll-voters-liked-trumps-inaugural-address-234148>
- Siswanto. (2018). *Kepemimpinan Donald Trump dan Turbulensi Tatanan Dunia*. Jurnal Penelitian Politik
- Stone, Mike. (2020). *Exclusive: U.S. eyes December agreement on F-35 jets with UAE - sources.* <https://www.reuters.com/article/us-israel-emirates-f35-exclusive-idUSKCN26D19T>
- Surwandono. (2013). *Relasi Antara Tingkat Konflik di Dunia Islam Dengan Setting Geografi Politik: Studi Kasus Konflik di Kawasan Timur Tengah*. Jurnal Hubungan Internasional Vol.2 No.1
- Taufiq, Firmanda; Alkholid, Ayu Maulida. (2021). *Iran-Us Relations After The Death Of Qassem Soleimani*. Journal Center for Middle Eastern Studies
- Times of Israel. (2020). *Full text: Trump's speech at Abraham Accords signing ceremony.* [timesofisrael.com/full-text-trumps-speech-at-abraham-accords-signing-ceremony/](https://www.timesofisrael.com/full-text-trumps-speech-at-abraham-accords-signing-ceremony/)
- Tohme, Maria. (2022). *The Abraham Accord Shaping A New Middle East*. University of Notre Dame
- Turak, Natasha. (2020). *Saudi Arabia is the 'white whale' of Israel's Middle East peace deals, Jerusalem official says.* CNBC <https://www.cnbc.com/2020/10/12/saudi-arabia-is-the-white-whale-of-israels-middle-east-peace-deals-jerusalem-official-says.html>
- U.S Department of State. (2020). *Abraham Accords Peace Agreement Between The United Arab Emirates and The State of Israel.* https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/09/UAE_Israel-treaty-signed-FINAL-15-Sept-2020-508.pdf
- U.S Department of State. (2020). *Abraham Accords Peace Agreement between The Kingdom of Bahrain and The State of Israel.* https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/09/Bahrain_Israel-Agreement-signed-FINAL-15-Sept-2020-508.pdf
- U.S Department of State. (2020). *Abraham Accords Peace Agreement between Sudan and The State of Israel.* <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/01/Sudan-AA.pdf>
- U.S Department of State. (2020). *Abraham Accords Peace Agreement between Morocco and The State of Israel.* <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/01/Joint-Declaration-US-Morocco-Israel.pdf>
- U.S Department of State. *The Abraham Accords Declaration.* <https://www.state.gov/the-abraham-accords/>
- U.S. Department of State.(2023).*Country Reports on Terrorism 2020: Iran.*<https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2020/iran/>
- U.S. Embassy in Uruguay. (2018). *Statement by the President Donald Trump on the Iran Nuclear Deal.* <https://uy.usembassy.gov/statement-president-donald-trump-iran-nuclear-deal/>
- Voice, AJC Global. (2022). *What are the Next Steps to Expand the Abraham Accords?.* <https://www.ajc.org/news/what-are-the-next-steps-to-expand-the-abraham-accords>
- Wallin, Matthew. (2018). *U.S. Military Bases and Facilities*. American Security Project
- Wintour, Patrick. (2020).*Iran hails lifting of 13-year UN arms embargo as 'momentous*

day'. <https://www.theguardian.com/world/2020/oct/18/iran-hails-lifting-un-arms-embargo-momentous-day-sanctions-us-protests>

Woolhandler, Steffie; et al. (2017). *Public policy and health in the Trump era*. The Lancet, Volume 397, Issue 10275, 705 - 753

Zamarrita, Ryan. (2020). *5 Ways the Trump Administration's Policy Failures Compounded the Coronavirus-Induced Economic Crisis*. Center for American Progress